



barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp257.336.795.588,57 terdiri dari:

- a) Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 senilai Rp247.068.478.950,57 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 12.a Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD

NO	URAIAN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	
	Inspektorat Daerah	20.590.200,00
	Badan Penghubung	718.400,00
	Badan Pengelola Perbatasan	5.805.080,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.271.032,00
	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	520.000,00
	Dinas Peternakan	4.530.000,00
2	Bahan Bakar Minyak	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	761.250,00
3	Alat Kebersihan	
	Badan Penghubung	186.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.730.100,00
	Dinas Peternakan	1.476.100,00
4	Persediaan Listrik	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	33.549.620,80
5	Persediaan Barang Cetak	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	58.128.472,10
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	957.829.000,00
6	Bahan Laboratorium	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	679.651.201,91
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid - 19)	2.813.949.837,78
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	122.369.836,24
7	Persediaan Air	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	16.552.374,20
8	Persediaan Barang Habis Pakai	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	122.024.242,86
9	Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	
	Dinas Kesehatan	576.068.728,58
10	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	
	Dinas Peternakan	400.000,00
11	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	
	Dinas Peternakan	14.369.558,00
12	Persediaan Bibit Ternak	
	Dinas Peternakan	596.800.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	77.180.000,00
13	Persediaan Bibit Tanaman	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.670.715,20
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	108.394.500,00
14	Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	
	Dinas Kesehatan (Covid - 19)	4.870.584.544,45
	Dinas Kesehatan	145.821.423,00
15	Persediaan Bahan Obat-obatan	
	Dinas Kesehatan	180.215.033.460,54
	Dinas Peternakan	305.700.925,00



NO	URAIAN	SALDO AKHIR (Rp)
	Biro Umum	20.823.858,00
16	Persediaan Farmasi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	11.815.851.093,88
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid - 19)	101.557.670,15
17	Persediaan Radiologi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	268.569.795,55
18	Persediaan Bahan Makanan	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	4.160.493,59
19	Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	
	Dinas Peternakan	379.718.750,00
20	Bahan Reagensia	
	Dinas Kesehatan	1.828.644.869,74
21	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.851.500.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	399.949.000,00
22	Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.618.016.717,00
	JUMLAH	247.068.478.950,57

- b) Persediaan Barang Lainnya senilai Rp10.298.316.638,00 merupakan Persediaan Barang Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp120.834.580,00 dan Persediaan Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp10.151.863.258,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp25.618.800,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.12

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari:

1)	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2021 Rp3.435.164.323,39	31 Desember 2020 Rp4.671.332.858,35
----	--	--	--

Investasi Jangka Panjang Non Permanen senilai Rp3.435.164.323,39 merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Tahun 2021 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.13

2)	Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2021 Rp826.388.351.037,41	31 Desember 2020 Rp589.959.563.029,02
----	--	--	--

Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan



menggunakan metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel b.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Metode
1	Bank NTT	656.454.248.428,56	470.590.588.184,02	Ekuitas
2	PT Jamkrida	144.361.968.383,15	108.995.345.610,16	Ekuitas
3	PT Flobamor	4.912.586.797,70	8.544.461.264,38	Ekuitas
4	PT KI Bolok	19.059.547.428,00	229.167.970,46	Ekuitas
5	PT ASKrida	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Biaya
Jumlah		826.388.351.037,41	689.959.663.029,02	

Adapun rincian perhitungan setiap BUMD adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp656.454.248.428,56. Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 28,44%. Saldo Investasi pada Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel b.2.1 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1	Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp470.590.588.184,02
2	Ditambah:	
	Penambahan Penyertaan Modal	Rp82.300.000.000,00
	Bagian Laba Tahun 2021 : 28,44% x Rp200.523.379.511,00	Rp57.028.849.132,93
	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp111.963.399.295,83
3	Dikurangi:	
	Penerimaan Dividen	Rp59.744.879.957,00
	Koreksi Perhitungan	Rp5.683.708.227,02
4	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp656.454.248.428,56

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2021 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp487.462.000.000,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PT Bank NTT oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT Tahun 2020 terdapat perbedaan pengakuan total penyertaan modal Pemprov NTT antara Bank NTT dan Pemprov NTT senilai Rp27.545.550.000,00. Di mana Bank NTT mengakui terdapat kapitalisasi dana cadangan oleh Bank NTT senilai Rp27.545.550.000,00 yang diakui berdasarkan keputusan RUPS sesuai akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor: 42 tanggal 25 Oktober 2019.



Namun Pemprov NTT, belum mengakui sebagai tambahan modal. Terhadap hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa selama Tahun 2021 Pemprov. NTT telah berproses untuk menetapkan Peraturan daerah terkait penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT hasil kapitalisasi namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemerintah Provinsi NTT belum mengakui sebagai tambahan modal karena belum dikeluarkan Nomor Registrasi oleh Kementerian dalam Negeri tentang Peraturan Daerah tersebut.

Terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT hasil kapitalisasi yang dilakukan oleh Bank NTT, Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan penyesuaian ketika sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp4.912.586.797,70. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,90% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,10% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel b.2.2 Perhitungan Investasi PT Flobamor

1	Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp8.544.461.264,38
2	Ditambah:	
	Bagian Laba Tahun 2021 : $99,90\% \times \text{Rp}923.649.886,00$	Rp922.726.236,11
3	Dikurangi:	
	Koreksi Perhitungan	Rp758.336.567,10
	Penerimaan Dividen	Rp500.000.000,00
	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp3.296.264.135,69
4	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp4.912.586.797,70

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2020 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi perusahaan yang menyebabkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tercatat senilai Rp4.912.586.797,70 (metode ekuitas).

Tahun 2021 PT Flobamor hanya menyetor Dividen laba tahun berjalan ke Pemprov. NTT senilai Rp500.000.000,00 dari total dividen yang wajib diterima Pemprov. NTT senilai Rp1.258.426.746,00 dan laba tahun 2021 *audited* PT Flobamor senilai Rp1.262.340.000,00 sehingga saldo Investasi Permanen Pemprov. NTT Tahun 2021 menjadi senilai Rp4.912.586.797,70.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida senilai Rp144.361.968.383,15. Penyertaan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,92% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,08% milik GKPRI Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel b.2.3 Perhitungan Investasi PT Jamkrida

1	Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp108.995.345.610,16
2	Ditambah:	
	Penambahan Penyertaan Modal	Rp25.000.000.000,00
	Bagian Laba Tahun 2021 : $99,92\% \times 12.013.071.185,00$	Rp11.989.045.042,63
	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp7.372.923.340,52
3	Dikurangi:	
	Penerimaan Dividen	Rp4.497.672.805,00
	Koreksi Perhitungan	Rp4.497.672.805,16
4	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp144.361.968.383,15

Total Penyertaan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp125.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas LKPD tahun 2020 ditemukan bahwa penyertaan modal pada PT Jamkrida tahun 2017 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terhadap hal tersebut selama Tahun 2021 Pemprov. NTT telah berproses untuk menetapkan Peraturan daerah terkait penambahan penyertaan modal namun sampai tanggal pelaporan Pemprov. NTT masih menunggu Nomor Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Laba bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

4. Penyertaan Modal pada PT KI Bolok senilai Rp19.059.547.428,00

Penyertaan Modal pada PT KI Bolok menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham sebesar 100% milik Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel b.2.4 Perhitungan Investasi PT KI Bolok

1	Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp229.167.970,46
2	Ditambah:	
	Penambahan Penyertaan Modal	Rp20.000.000.000,00
	Bagian Laba Tahun 2021 : $100\% \times 1.250.300.544$	(Rp1.250.300.544,00)
	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp80.680.001,54
3	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp19.059.547.428,00

Tahun 2021 Pemprov. NTT menambah Penyertaan Modal senilai Rp20.000.000.000,00 yang ditransfer pada tanggal 23 Februari 2021 sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT



sampai dengan tahun 2021 adalah senilai Rp22.000.000.000,00. Namun sampai dengan Tahun 2021 PT KI Bolok sesuai laporan keuangan (audited) mengalami kerugian di Tahun 2021 senilai Rp1.250.300.544,00. Dengan menggunakan metode ekuitas maka saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tercatat hanya senilai Rp19.059.547.428,00.

5. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Askrida senilai Rp1.600.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya (*cost*) sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT Askrida sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp1.600.000.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.14

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp9.165.391.028.141,05 yang disajikan berdasarkan nilai buku dari aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel c Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Tanah	2.970.509.471.380,05	2.864.160.351.261,05	106.349.120.119,00
2	Peralatan dan mesin	1.554.737.401.738,59	1.328.780.680.618,36	225.956.721.120,23
3	Gedung dan Bangunan	2.169.324.399.228,74	2.001.617.143.631,33	167.507.255.597,41
4	Jalan, irigasi dan jaringan	5.494.407.819.490,25	4.969.873.506.624,75	524.534.312.865,50
5	Aset tetap lainnya	203.325.481.660,99	173.927.372.831,79	29.398.108.829,20
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	276.017.881.949,50	200.194.334.380,50	75.823.547.569,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.502.931.427.307,07)	(3.038.045.395.081,19)	(464.886.032.225,88)
	Jumlah	9.165.391.028.141,05	8.500.707.994.266,59	664.683.033.874,46

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp664.683.033.874,46 atau 7,82%. Rincian masing-masing aset tetap sebagai berikut:

1) Tanah	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp2.970.509.471.380,05	Rp2.864.160.351.261,05

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 disajikan senilai Rp2.970.509.471.380,05 merupakan seluruh tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian mutasi sebagai berikut:





Tabel c.1 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	2.864.160.351.261,05
2	Penambahan:	7.889.538.000,00
	Belanja Modal TA 2021	147.952.000,00
	Hibah	199.686.000,00
	Mutasi Antar SKPD	625.000.000,00
	Koreksi	143.201.248.939,00
3	Pengurangan:	37.824.766.820,00
	Mutasi Antar SKPD	625.000.000,00
	Hibah	37.199.766.820,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	2.970.509.471.380,05

Tabel c.1.1 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	178.159.822.045,52	136.624.348.939,00	-	314.784.170.984,52
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	35.061.700.000,00	-	-	35.061.700.000,00
3	Dinas Kesehatan	78.785.200.000,00	-	-	78.785.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	360.918.640.285,70	-	-	360.918.640.285,70
5	Dinas Sosial	21.362.415.000,00	-	-	21.362.415.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.757.954.896,00	-	-	53.757.954.896,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.534.320.000,00	-	1.478.820,00	5.532.841.180,00
8	Dinas Perhubungan	40.817.983.501,00	-	-	40.817.983.501,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.652.500.000,00	-	-	4.652.500.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.158.100.000,00	-	8.000.000.000,00	17.158.100.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.676.000.000,00	-	-	227.676.000.000,00
12	Dinas Keasrian dan Perpustakaan	4.684.511.000,00	-	-	4.684.511.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.652.207.019,31	-	-	86.652.207.019,31
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.772.803.400,00	199.686.000,00	-	12.972.489.400,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43.345.582.350,00	-	625.000.000,00	42.720.582.350,00
16	Dinas Peternakan	29.574.125.078,52	-	-	29.574.125.078,52
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.436.685,00	-	-	1.531.436.685,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.377.610.000,00	-	-	20.377.610.000,00
19	Biro Umum	305.760.470.000,00	1.707.300.000,00	29.122.390.000,00	278.345.380.000,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.333.500.000,00	-	-	40.333.500.000,00
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.345.600.000,00	-	-	2.345.600.000,00
22	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.260.352.153.000,00	6.642.552.000,00	75.900.000,00	1.285.918.905.000,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.298.400.000,00	-	-	7.298.400.000,00
25	Inspektorat Daerah	1.600.000.000,00	-	-	1.600.000.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.897.314.000,00	-	-	13.897.314.000,00
	Jumlah	2.864.160.351.261,05	144.173.886.939,00	37.824.766.820,00	2.970.509.471.380,05



Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.864.160.351.261,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp144.173.886.939,00 dan pengurangan senilai Rp37.824.766.820,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 Senilai Rp2.970.509.471.380,05. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut:

- 1) Tanah aset Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4.668.580,50 m² senilai Rp136.584.348.939,00 yang telah diinventarisasi oleh BPAD Prov. NTT dan dicatat sesuai KIB A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) 22 ruas tanah bawah jalan sesuai SK Nomor 256 yang belum tercatat pada KIB A Dinas PUPR dan tujuh ruas tanah bawah jalan yang tidak terdapat dalam SK Nomor 256 namun sudah dicatat pada KIB A dapat dijelaskan bahwa Dinas PUPR sementara proses Peraturan Gubernur terkait pengakuannya; dan
- 3) 302 bidang tanah dan 570 bidang tanah dari aset P2D yang belum bersertifikat sementara berproses lewat Inventarisasi agar pengajuan Sertifikat dapat berjalan baik.

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.554.737.401.738,59	Rp1.328.780.680.618,36

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai Rp1.554.737.401.738,59 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel c.2 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	1.328.780.680.618,36
2	Penambahan:	255.014.182.233,00
	Belanja Modal TA 2021	185.901.613.833,00
	BTT	25.877.746.691,00
	Mutasi Antar KIB	3.929.358.262,00
	Mutasi Antar SKPD	1.131.700.000,00
	Reklas Barjas	30.869.700,00
	Hibah	34.568.780.948,00
	Koreksi	2.574.312.799,00
3	Pengurangan:	29.057.461.112,77
	Koreksi Nilai	222.685.000,00
	Hutang	307.242.700,00
	Mutasi Antar KIB	20.244.875.714,00
	Mutasi Antar SKPD	1.131.700.000,00
	Reklas Barjas	516.338.475,00
	Kapitalisasi	522.196.329,77



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Rusak Berat	6.112.422.894,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	1.554.737.401.738,59

Tabel c.2.1 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.450.215.837,78	128.385.815.428,00	20.223.281.714,00	742.612.750.351,78
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	198.446.631.387,37	23.157.897.852,00	335.837.977,77	221.268.491.061,60
3	Dinas Kesehatan	110.318.938.895,00	32.270.845.958,00	390.137.800,00	142.198.647.251,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	33.625.312.686,00	5.035.769.254,00	563.888.400,00	38.097.095.520,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.646.144.404,00	1.180.321.400,00	4.320.000,00	4.026.145.804,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	19.633.607.876,00	200.428.422,00	0,00	19.834.036.298,00
7	Dinas Sosial	12.505.167.902,02	329.755.353,00	32.165.000,00	12.802.778.255,02
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.594.770.054,00	3.580.000,00	140.000,00	1.598.210.054,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.315.466.438,94	7.453.495.429,00	14.923.659,00	53.754.038.208,94
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.655.103.904,00	118.638.600,00	289.500.000,00	2.504.243.504,00
11	Dinas Perhubungan	2.381.170.753,00	35.187.838.400,00	89.915.300,00	37.479.094.853,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.075.170.952,99	417.059.300,00	9.830.000,00	7.482.400.252,99
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.732.683.553,00	118.078.800,00	65.172.800,00	5.785.567.553,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.326.037.355,00	351.731.600,00	0,00	4.677.768.955,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.918.423.054,00	358.911.500,00	160.372.500,00	4.116.962.054,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.426.967.531,00	323.457.300,00	772.598.304,00	5.977.626.527,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	32.897.754.917,00	464.992.836,00	181.480.000,00	33.181.267.553,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.808.553.474,95	696.612.900,00	4.612.000,00	3.500.554.374,95
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27.180.588.846,00	4.782.277.505,00	21.773.000,00	31.921.093.151,00
20	Dinas Peternakan	9.332.310.929,05	154.416.800,00	800.000,00	9.486.927.729,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.387.671.976,00	57.745.000,00	0,00	4.445.416.976,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.823.044.003,85	440.508.700,00	2.324.500,00	5.261.228.203,85
23	Biro Umum	45.039.523.904,00	1.001.439.573,00	1.994.156.742,00	44.046.806.835,00
24	Biro Hukum	870.862.399,00	232.284.000,00	0,00	1.103.126.399,00
25	Biro Organisasi	891.485.254,00	22.672.000,00	23.750.000,00	890.407.254,00
26	Biro Ekonomi dan Kerjasama	1.642.613.579,00	4.794.000,00	221.128.000,00	1.426.249.579,00
27	Biro Pemerintahan	1.763.802.205,82	48.525.000,00	0,00	1.812.327.205,82
28	Biro Administrasi Pimpinan	2.623.165.200,00	214.848.050,00	0,00	2.238.013.250,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.982.538.310,10	88.087.704,00	110.400.000,00	2.960.226.014,10
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.845.730.039,00	657.371.500,00	1.502.604.000,00	21.000.497.539,00
31	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.860.130.573,00	257.796.600,00	60.000.000,00	4.857.926.273,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	43.919.078.658,43	4.341.154.782,00	1.798.486.116,00	46.461.776.322,43
33	Badan Keuangan Daerah	7.374.760.287,00	517.110.943,00	21.393.000,00	7.870.508.230,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	3.925.817.831,00	2.532.104.099,00	3.874.000,00	6.454.047.930,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.305.008.517,08	350.139.000,00	14.000.000,00	8.641.147.517,08
36	Badan Pengelola Perbatasan	1.564.340.900,00	100.640.000,00	0,00	1.664.980.900,00
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	4.967.098.169,00	281.471.000,00	116.585.000,00	5.131.983.169,00
38	Inspektorat Daerah	2.023.838.096,00	2.732.022.017,00	46.282.500,00	4.709.577.613,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.299.126.287,00	155.790.930,00	1.680.000,00	1.453.236.217,00
Jumlah		1.328.780.680.618,36	255.014.182.233,00	29.057.461.112,77	1.554.737.401.738,59

Berdasarkan saldo awal senilai Rp1.328.780.680.618,36 maka terjadi kenaikan senilai Rp255.014.182.233,00 dan penurunan senilai Rp29.057.461.112,77 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp1.554.737.401.738,59.

3) Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp2.169.324.399.228,74	Rp2.001.817.143.631,33

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai Rp2.169.324.399.228,74 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel c.3 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	2.001.817.143.631,33
2	Penambahan:	190.467.760.617,41
	Belanja Modal TA 2021	135.344.543.385,00
	BTT	14.599.809.692,00
	Hibah	130.870.540,00
	Mutasi Antar KIB	7.502.688.994,00
	Mutasi Antar SKPD	6.111.738.800,00
	Reklas Barjas	3.049.457.000,00
	Koreksi	21.392.418.906,41
	Hutang	2.336.253.300,00
3	Pengurangan:	22.960.505.020,00
	Mutasi Antar KIB	4.817.593.070,00
	Mutasi Antar SKPD	6.111.738.800,00
	Hibah	10.495.389.400,00
	Rusak Bersi	1.535.783.750,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	2.169.324.399.228,74



Tabel c.3.1 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.005.517.863.896,45	81.511.447.490,00	1.076.367.800,00	1.005.952.943.786,45
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	101.838.724.660,00	296.497.492,00	265.000.000,00	101.870.222.352,00
3	Dinas Kesehatan	57.645.791.202,85	24.896.259.350,00	-	82.542.050.552,85
4	Dinas Pekerjaan Umum	154.088.288.130,00	6.027.731.800,00	-	160.094.019.930,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	3.975.967.426,00	-	-	3.975.967.426,00
6	Dinas Sosial	39.851.527.210,45	746.596.564,00	-	40.598.123.774,45
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47.317.844.838,50	3.121.956.090,00	-	50.439.800.928,50
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.420.747.600,00	906.484.850,00	-	5.327.232.450,00
9	Dinas Perhubungan	31.217.158.345,25	5.960.417.409,00	-	37.177.575.754,25
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.102.170.000,00	-	-	2.102.170.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.542.070.724,00	-	9.419.021.800,00	13.123.048.924,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.261.199.025,00	-	-	17.261.199.025,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.692.471.991,51	15.196.117.185,00	-	30.790.589.176,51
14	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan	7.388.538.000,00	2.141.722.000,00	-	9.530.260.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.166.816.532,04	13.214.031.000,00	2.004.035.000,00	35.376.812.532,04
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31.318.525.882,29	3.059.200.000,00	-	34.377.725.882,29
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.726.719.761,00	3.670.873.299,41	174.647.000,00	33.222.946.060,41
18	Dinas Peternakan	40.692.941.314,00	506.537.000,00	-	41.199.478.314,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.447.324.000,00	-	-	10.447.324.000,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.079.741.554,00	-	-	13.079.741.554,00
21	Biro Umum	217.481.793.164,00	12.539.854.000,00	5.937.091.800,00	224.084.555.364,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.346.955.960,00	85.092.500,00	85.092.500,00	25.346.955.960,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.888.196.000,00	-	1.270.783.750,00	1.617.412.250,00
24	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	54.731.898.669,99	5.468.517.588,00	2.748.485.570,00	57.451.950.687,99
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.419.672.400,00	551.025.000,00	-	16.970.697.400,00
26	Badan Pengelola Perbatasan	183.634.000,00	-	-	183.634.000,00
27	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.939.577.126,00	-	-	12.939.577.126,00
28	Inspektorat Daerah	10.444.800.000,00	295.400.000,00	-	10.740.200.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.208.084.000,00	-	-	1.208.084.000,00
	Jumlah	2.001.817.143.631,33	190.467.760.617,41	22.960.505.020,00	2.169.324.399.228,74

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.001.817.143.631,33 maka terjadi kenaikan senilai Rp190.467.760.617,41 dan penurunan senilai Rp22.960.505.020,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp2.169.324.399.228,74.



4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021 Rp5.494.407.819.490,25	31 Desember 2020 Rp4.969.873.506.624,75
--------------------------------	--	--

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai Rp5.494.407.819.490,25 merupakan seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap dipakai dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel c.4 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	4.969.873.506.624,75
2	Penambahan:	693.351.380.809,50
	Belanja Modal TA 2021	572.412.496.697,00
	BTT	2.132.382.880,00
	Mutasi Antar KIB	90.518.716.350,00
	Koreksi	25.837.248.882,50
	Reklas Belanja Hibah	2.450.536.000,00
3	Pengurangan:	168.817.067.944,00
	Koreksi Nilai	100.000.000,00
	Mutasi Antar KIB	168.600.034.034,00
	Hibah	116.533.910,00
	Kapitalisasi	500.000,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	5.494.407.819.490,25

Tabel c.4.1 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.934.207.288,00	139.655.152,00	-	8.073.862.438,00
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	8.030.778.858,00	-	-	8.030.778.858,00
3	Dinas Kesehatan	1.439.904.727,00	3.664.127.889,00	-	5.104.032.616,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	4.870.874.381.598,49	660.246.297.059,50	162.683.205.356,00	5.368.457.473.301,99
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	34.251.000,00	97.800.000,00	97.800.000,00	34.251.000,00
7	Dinas Sosial	1.517.306.500,00	15.000.000,00	-	1.532.306.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.495.000,00	-	-	30.495.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.995.864.772,00	5.221.922.595,00	100.000.000,00	8.117.787.367,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71.669.300,00	-	-	71.669.300,00
11	Dinas Perhubungan	4.458.128.934,00	17.721.942.234,00	5.836.388.678,00	16.344.682.490,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.950.250,00	-	-	86.950.250,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.077.369.260,00	-	116.533.910,00	960.835.350,00
14	Dinas Penanaman Modal dan	920.714.775,00	-	-	920.714.775,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	104.125.000,00	-	-	104.125.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	189.757.950,00	-	-	189.757.950,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.932.645.641,00	1.799.590.000,00	-	15.732.225.641,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.875.916.354,76	3.959.581.880,00	-	5.835.498.234,76
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.193.650.348,00	302.181.000,00	500.000,00	4.495.331.348,00
20	Dinas Peternakan	6.481.096.394,00	109.553.000,00	-	6.591.049.394,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34.565.181.944,50	-	-	34.565.181.944,50
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.290.400,00	-	-	269.290.400,00
23	Biro Umum	3.104.477.783,00	-	-	3.104.477.783,00
24	Biro Administrasi Pimpinan	30.322.000,00	-	-	30.322.000,00
25	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15.058.000,00	-	-	15.058.000,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	443.238.843,00	1.120.000,00	-	444.358.843,00
27	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	230.900.000,00	-	-	230.900.000,00
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.241.887.239,00	57.850.000,00	-	2.299.737.239,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	2.640.000,00	2.640.000,00	-
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.045.824.800,00	-	-	2.045.824.800,00
31	Badan Pengelola Perbatasan	9.470.867,00	-	-	9.470.867,00
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	657.644.800,00	-	-	657.644.800,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	11.730.000,00	-	11.730.000,00
	Jumlah	4.969.873.506.624,75	693.351.380.809,50	168.817.067.944,00	5.494.407.819.490,25

Berdasarkan saldo awal senilai Rp4.969.873.506.624,75 maka terjadi kenaikan senilai Rp693.351.380.809,50 dan penurunan senilai Rp168.817.067.944,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp5.494.407.819.490,25.

5) Aset Tetap lainnya

31 Desember 2021
Rp203.352.481.660,99

31 Desember 2020
Rp173.927.372.831,79

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai Rp203.352.481.660,99 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh



dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel c.5 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	173.927.372.831,79
2	Penambahan:	34.433.630.344,20
	Belanja Modal TA 2021	9.451.016.885,00
	Mutasi Antar KIB	20.588.967.714,00
	Reklas Barjas	4.373.389.317,00
	Koreksi	20.256.428,20
3	Pengurangan:	8.035.621.515,00
	Koreksi Nilai	1.870.120.430,00
	Mutasi Antar KIB	748.365.000,00
	Reklas Barjas	123.005.890,00
	Kapitalisasi	842.200,00
	ATB	2.293.187.995,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	203.325.481.660,99

Tabel c.5.1 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.040.040.314,79	28.606.533.659,20	-	183.736.573.973,99
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	91.193.825,00	-	-	91.193.825,00
3	Dinas Kesehatan	245.631.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	245.631.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	33.095.800,00	723.555.995,00	723.555.995,00	33.095.800,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.985.000,00	-	-	1.985.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	1.498.300,00	-	-	1.498.300,00
7	Dinas Sosial	505.604.000,00	-	-	505.604.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2.841.678,00	2.841.678,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.559.829,00	2.104.484,00	2.104.484,00	6.311.559.829,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.956.700,00	90.000,00	90.000,00	11.956.700,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	156.349.950,00	102.214.200,00	101.391.200,00	157.172.950,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.221.000,00	2.131.300.000,00	2.131.300.000,00	162.221.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.482.000,00	10.643.000,00	10.643.000,00	7.482.000,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	160.604.000,00	-	-	160.604.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.283.563.857,00	3.555.000,00	3.555.000,00	5.283.563.857,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	456.743.500,00	3.232.000,00	3.232.000,00	456.743.500,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	294.900.000,00	3.428.000,00	3.428.000,00	294.900.000,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.391.300,00	-	-	48.391.300,00
20	Dinas Peternakan	3.310.180.406,00	1.127.065.000,00	1.870.120.430,00	2.567.104.976,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	182.125.000,00	1.443.807.600,00	-	1.605.932.600,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
23	Biro Umum	207.600.000,00	-	-	207.600.000,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
25	Biro Organisasi	65.900.000,00	-	-	65.900.000,00
27	Biro Pemerintahan	7.799.100,00	-	-	7.799.100,00
28	Biro Administrasi Pimpinan	32.997.850,00	-	-	32.997.850,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	119.112.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	119.112.000,00
30	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	517.111.900,00	32.086.328,00	32.086.328,00	517.111.900,00
31	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	363.727.900,00	-	-	363.727.900,00
32	Badan Keuangan Daerah	10.391.000,00	58.350.000,00	58.350.000,00	10.391.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	2.000.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	2.000.000,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.318.400,00	-	-	120.318.400,00
35	Badan Pengelola Perbatasan	10.180.900,00	-	-	10.180.900,00
36	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	182.130.000,00	-	-	182.130.000,00
37	Inspektorat Daerah	-	62.193.400,00	62.193.400,00	-
Jumlah		173.927.372.831,79	34.433.830.344,20	5.035.621.515,00	203.325.481.660,99

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** **31 Desember 2021**
Rp276.017.881.949,50 **31 Desember 2020**
Rp200.194.334.380,50

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai Rp276.017.881.949,50 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel c.6 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	200.194.334.380,50
2	Penambahan:	165.681.500.997,00
	Mutasi Antar KIB	165.343.204.926,00
	Koreksi	338.376.071,00
	Reklas Barjas	3.614.015.000,00
3	Pengurangan:	93.472.048.428,00
	Mutasi Antar KIB	93.472.048.428,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	276.017.881.949,50

Tabel c.6.1 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10	-	-	19.891.722.136,00
2	Dinas Kesehatan	2.649.488.563,00	-	-	2.649.488.563,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	144.588.775.064,40	188.418.166.427,00	87.417.156.350,00	219.973.770.141,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	-	97.800.000,00	-	97.800.000,00
5	Dinas Sosial	772.766.000,00	-	-	772.766.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.586.409.992,00	-	5.118.122.500,00	3.470.287.492,00
7	Dinas Perhubungan	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00





No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
8	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00	-	-	1.056.374.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00	-	-	2.411.235.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	247.000.000,00	54.570.000,00	-	301.570.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.500.000,00	21.594.000,00	-	28.094.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.354.597.060,00	-	499.000.000,00	855.597.060,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00	-	-	1.589.000.000,00
14	Badan Pendanaan dan Aset Daerah	1.295.544.675,00	2.705.465.570,00	144.369.578,00	3.827.640.667,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.454.521.900,00	-	-	15.454.521.900,00
16	Inspektorat Daerah	295.400.000,00	-	295.400.000,00	-
Jumlah		200.194.334.380,50	169.295.595.997,00	93.472.048.428,00	276.017.881.949,50

Berdasarkan saldo awal senilai Rp200.194.334.380,50 maka terjadi kenaikan senilai Rp169.295.595.997,00 dan penurunan senilai Rp93.472.048.428,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp276.017.881.949,50. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan GOR Oepoi senilai Rp13.390.000.000,00 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana APBN senilai Rp10.390.000.000,00 dan APBD Provinsi NTT senilai Rp3.000.000.000,00 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/1.20.00/SP2D/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dicatat sebagai belanja hibah kepada Komite Pembangunan GOR. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap KDP karena belum ada Dokumen resmi. Selama tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 2) Rehabilitasi Stadion Oepoi yang pada awalnya dibangun di tahun 2017 s.d. 2018 belum selesai. Pada tahun 2020 Stadion Oepoi dilanjutkan pembangunannya melalui belanja APBN Kementerian PUPR. Per 31 Desember 2020 telah dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) terhadap pekerjaan Tahap I, dengan rincian pekerjaan berupa rehabilitasi tribun utama, pembangunan tribun, dan penanaman rumput pada lapangan sepak bola. Tambahan rehabilitasi Stadion Oepoi tersebut masih belum dicatat dan dimanfaatkan karena belum ada serah terima sampai 31 Desember 2021.
- 3) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair per 31 Maret 2019 progres fisik sudah mencapai 67,721%. Pada tahun 2021 pembangunan tersebut belum dilanjutkan.



- 4) Pembangunan Tahap I Monumen Pancasila sampai dengan Juni 2019 sudah mencapai 87%. Pada tahun 2021 pembangunan tersebut belum dilanjutkan.

7) Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021 (Rp3.502.931.427.307,07)	31 Desember 2020 (Rp3.038.045.395.081,19)
-------------------------	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 yang disajikan senilai defisit (Rp3.502.931.427.307,07) mencakup akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel c.7 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	(3.038.045.395.081,19)
2	Penambahan:	(484.546.342.828,38)
	Beban Penyusutan TA 2021	(479.868.579.327,18)
	Hibah	(68.546.000,80)
	Mutasi Antar SKPD	(576.087.040,00)
	Koreksi	(4.231.130.460,40)
3	Pengurangan:	(19.660.310.602,50)
	Koreksi Nilai	(3.764.102.887,50)
	Mutasi Antar SKPD	(809.087.040,00)
	Reklas Barjan	(7.486.164.031,00)
	Rusak Berat	(7.600.956.644,00)
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (1+2-3)	(3.502.931.427.307,07)

Tabel c.7.1 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(421.049.124.289,81)	(123.307.052.137,83)	(3.425.879.087,50)	(540.930.297.349,74)
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(158.992.339.671,37)	(24.072.679.401,05)	(217.750.000,00)	(180.847.269.072,42)
3	Dinas Kesehatan	(91.217.593.536,49)	(10.293.564.513,76)	(276.000.000,00)	(101.235.158.050,27)
4	Dinas Pekerjaan Umum	(1.984.745.752.225,51)	(268.719.271.011,30)	(560.000.000,00)	(2.232.905.023.236,81)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.896.806.784,94)	(233.266.690,47)	-	(2.130.073.475,41)
6	Badan Penanggulangan Bencana	(16.854.000.268,08)	(1.789.915.122,00)	-	(18.643.915.390,08)
7	Dinas Sosial	(28.627.426.190,96)	(1.256.988.781,00)	-	(29.884.414.971,96)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(968.467.971,86)	(162.302.005,71)	-	(1.150.769.977,57)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(48.111.367.480,00)	(5.498.429.183,98)	-	(54.609.796.663,98)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(3.271.273.014,14)	(372.701.855,69)	(231.000.000,00)	(3.412.974.869,83)
11	Dinas Perhubungan	(10.322.562.307,36)	(1.132.974.793,58)	(85.000.000,00)	(11.370.567.100,94)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.473.525.782,10)	(509.292.880,14)	-	(7.982.818.622,24)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(16.999.454.783,28)	(894.974.451,91)	(7.546.054.031,00)	(10.348.365.184,17)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.711.291.376,25)	(1.201.115.716,95)	-	(5.912.407.093,20)



No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Tahun 2021
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(3.766.242.290,68)	(846.948.062,51)	(140.000.000,00)	(4.473.190.353,19)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(8.572.596.643,16)	(563.739.306,76)	(772.343.304,00)	(8.383.962.645,92)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(26.335.207.790,76)	(4.201.739.113,09)	(181.480.000,00)	(30.355.468.903,85)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(5.238.737.389,77)	(1.001.997.535,75)	-	(7.240.734.925,52)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(22.295.921.914,09)	(3.819.486.154,19)	(55.887.040,00)	(26.059.521.028,28)
20	Dinas Peternakan	(16.601.260.451,89)	(1.962.930.614,19)	-	(18.564.221.065,88)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(14.188.055.347,39)	(1.807.108.372,15)	-	(15.995.163.719,54)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.008.967.116,91)	(560.162.053,94)	-	(8.559.129.170,85)
23	Biro Umum	(58.070.803.453,01)	(9.297.952.098,41)	(1.480.095.500,00)	(65.888.680.461,42)
24	Biro Hukum	(732.140.263,28)	(61.284.065,71)	-	(793.424.328,99)
25	Biro Organisasi	(723.500.254,00)	(45.722.300,00)	(23.750.000,00)	(745.472.554,00)
26	Biro Ekonomi dan Kerjasama	(1.303.632.489,71)	(157.080.955,00)	(219.700.000,00)	(1.241.013.454,71)
27	Biro Pemerintahan	(1.323.123.520,11)	(88.384.914,29)	-	(1.411.508.434,40)
28	Biro Administrasi Pimpinan	(1.246.842.500,01)	(190.371.385,71)	-	(1.436.213.885,72)
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(2.078.857.531,52)	(353.578.737,14)	(110.160.000,00)	(2.322.276.268,86)
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(25.138.915.987,54)	(5.821.494.108,56)	(1.502.604.000,00)	(29.457.806.078,10)
31	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.581.818.119,51)	(793.132.478,87)	(1.330.783.750,00)	(4.044.164.948,38)
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(35.825.132.205,01)	(7.606.845.485,96)	(1.410.185.000,00)	(41.821.592.690,97)
33	Badan Keuangan Daerah	(3.842.724.457,40)	(1.250.664.472,48)	-	(5.093.388.929,88)
34	Badan Kepegawaian Daerah	(2.683.918.857,40)	(674.066.786,40)	-	(3.357.985.443,80)
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(10.195.998.634,02)	(1.366.107.363,48)	-	(11.562.103.997,50)
36	Badan Pengelola Perbatasan	(1.205.518.905,21)	(159.646.557,29)	-	(1.365.165.462,50)
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(6.505.007.760,71)	(955.239.328,74)	(91.600.000,00)	(7.369.747.089,45)
38	Inspektorat Daerah	(1.488.161.949,57)	(413.946.341,07)	(126.600,00)	(1.881.999.490,84)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.851.277.806,80)	(192.385.211,50)	-	(2.043.663.018,30)
	Jumlah	(3.036.945.395.081,19)	(484.546.342.628,36)	(19.680.310.602,50)	(3.502.931.427.307,07)

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.15** dan Rincian Lengkap Aset yang berasal dari Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran N.16**.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp397.673.292.723,31 adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya terdiri dari:



1) Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021 Rp27.722.867.144,72	31 Desember 2020 Rp31.207.842.280,09
----------------------------------	---	---

Saldo Tagihan Jangka Panjang senilai Rp31.207.842.280,09 merupakan tagihan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Temuan BPK RI senilai Rp11.516.085.697,66 dan Aparat Pengawasan Fungsional senilai Rp16.206.781.447,06 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021. Aparat Pengawasan Fungsional terdiri dari:

Tabel d.1 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Temuan
Aparat Pengawasan Fungsional

Uraian	Nilai (Rp)
Inspektorat Prov. NTT	4.837.864.961,39
Inspektorat Jenderal Kemendagri	1.595.590.000,00
BPKP	9.773.326.485,67
Jumlah	16.206.781.447,06

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.17

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2021 Rp35.243.950.000,00	31 Desember 2020 Rp33.060.950.000,00
---	---	---

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp35.243.950.000,00 merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp7.092.600.000,00 dengan pola KSP (Kerjasama Pemanfaatan), jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 18.214 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983, HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00,
- 2) PT Sarana Investama Manggabar sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah (BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggabar telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan.

Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat



Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00.

- 3) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata Estate di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 60.060 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;
- 2) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 1.710 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- 3) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 6.595 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- 4) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/III/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 12.040 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.18 dan N.19

3)	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp14.851.932.133,00	Rp12.558.744.138,00

Saldo senilai Rp14.851.932.133,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp12.558.744.138,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2021 senilai Rp2.293.187.995,00 dengan rincian penambahan pada SKPD:

Tabel d.3 Aset Tak Berwujud SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	24.950.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	655.995,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.639.000,00
4	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.131.300.000,00



No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.543.000,00
6	Inspektorat Daerah	25.000.000,00
Jumlah		2.293.167.995,00

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.20

4) Aset Lain-Lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp325.331.513.354,31	Rp342.816.251.897,16

Saldo senilai Rp325.331.513.354,31 merupakan Aset Lain-Lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset Lain-lain Lainnya senilai Rp256.036.905.000,00 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT yang dikelola pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp4.680.805.000,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp250.168.500.000,00. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa aset Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah masyarakat namun sampai dengan tanggal pelaporan masih sementara dilakukan tahap pengukuran besaran tanah oleh Pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) senilai Rp4.680.805.000,00. Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00, dan tanah yang telah kalah sengketa tetapi masih dalam proses pengumpulan bukti baru (Novum) untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) senilai Rp1.187.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Aset Lain-lain Lainnya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam bentuk aset Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang direncanakan untuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) namun sampai dengan Tahun pelaporan masih sementara dilakukan tahap pengukuran besaran tanah oleh Pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) senilai Rp4.680.805.000,00 yakni pada Desa Uhtuhtuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor.
 - b. Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjakasikan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan.

Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m² atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500 lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemrov NTT oleh PT Semen Kupang seluas ±1.029.500 m². Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas ±1.029.500 m² yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai aset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 (1.029.500 m² x Rp243.000,00), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020.

- c. Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000.

Berdasarkan temuan BPK bahwa aset tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, karena memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2020 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga aset tetap tanah



seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke asset lainnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.21**

- 2) Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat yang ada di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp122.316.099.235,62 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp83.151.914.131,31).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.22**

- 3) Aset Lain yang dialihkan dari Aset Lancar senilai Rp298.540.700,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp108.712.457,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2021 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.23**

- 4) Aset lainnya yang tidak digunakan Pemerintah senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.24**

- 5) Aset untuk dihapus senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISIMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.25**

- 6) Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp25.504.104.750,00 dengan rincian sebagai berikut:



- a. Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
- b. Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.143.031.000,00;
- c. Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;
- d. Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00;
 - i. Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2021 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan
 - ii. Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.26

5)	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 Rp5.476.969.908,72	31 Desember 2020 (Rp3.918.474.534,45)
----	---	---	---

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp1.558.495.374,27) dari saldo awal senilai (Rp3.918.474.534,45) menjadi (Rp5.476.969.908,72) yang merupakan koreksi Amortisasi pada SKPD senilai (Rp378.849.950,00) dan penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp1.179.645.424,27).

2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Utang Bagi Hasil Pajak. Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp641.414.208.027,47.

a.	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 Rp390.635.768.027,47	31 Desember 2020 Rp.156.520.948.224,28
----	--------------------------------	---	--

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp390.635.768.027,47 mengalami kenaikan sebesar Rp234.114.819.803,19 atau 59,93% dari tahun 2020.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:



1)	Utang Bunga Kepada Sektor Perbankan	31 Desember 2021 Rp0,00	31 Desember 2020 1.070.113.277,01
----	--	--	--

Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki Utang Bunga Sektor Perbankan atas Kewajiban Bulan Desember 2021.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.27

2)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2021 Rp210.015.569.086,21	31 Desember 2020 Rp71.958.361.000,00
----	---	--	---

Hutang Pinjaman Pihak Ketiga senilai Rp210.015.569.086,21 merupakan utang kewajiban pokok pinjaman PT Bank NTT yang dibayarkan tahun 2022 senilai Rp71.958.361.000,21 sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: 376/DIR-DPKrKM/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 perihal Persetujuan Kredit dan utang kewajiban pokok pinjaman PTSMI-Reguler yang dibayarkan tahun 2022 senilai Rp138.057.208.086,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.28 dan N.29

3)	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2021 Rp2.712.571.253,79	31 Desember 2020 Rp1.262.383.333,34
----	---------------------------------------	--	--

Jumlah senilai Rp2.712.571.253,79 merupakan Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran Sewa Ruko dan sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel a.3 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Rp	277.125.000,01
1	Sewa Ruko	Rp	232.333.333,34
2	Gedung Eks Lokabinkra	Rp	44.791.666,67
Piutang Lain-lain (Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah)		Rp	2.435.446.253,78
1	Sewa Tanah	Rp	2.042.567.087,06
2	Kuliner Depot	Rp	243.775.000,03
3	Sewa Tanah Eks Sekolah Cina	Rp	23.504.166,67
4	Sewa Bangunan Kantin Kantor Gubernur NTT Pertama	Rp	89.766.666,66
5	Sewa tanah di Kompleks UPT Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	Rp	35.833.333,34
Jumlah		Rp	2.712.571.253,79

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.30, N.30.1, N.30.2

4)	Utang Belanja	31 Desember 2021 Rp34.053.595.722,47	31 Desember 2020 Rp33.177.073.949,93
----	----------------------	---	---

Jumlah senilai Rp34.053.595.722,47 terdiri dari Utang Belanja Pegawai Senilai Rp2.613.682.351,00, Utang Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp29.103.660.071,47 dan Utang Belanja Modal senilai Rp2.336.253.300,00. Utang belanja pegawai terdiri dari utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan senilai Rp176.522.634,00, pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp2.166.859.526,00 dan pada



BLUD SPAM senilai Rp270.300.191,00 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.005.535.275,50, RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang senilai Rp309.285.734,00 dan pada BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp25.788.839.061,97. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Biro Umum senilai Rp2.336.253.300,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.31, N.31.1, N.31.2, N.31.3, N.32, N.33, N.33.1, N.33.2, dan N.34.**

5) Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp143.854.031.965,00	Rp49.053.016.664,00

Jumlah senilai Rp143.854.031.965,00 merupakan Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2021 antara lain berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp143.496.614.528,00 dan Pajak Air Bawah tanah senilai Rp357.417.437,00. Pengakuan uang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor: 87 Tahun 2021 Tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2021. Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.35**

b. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp250.778.440.000,00	Rp.143.916.722.000,00

Jumlah senilai Rp250.778.440.000,00 merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Jangka Menengah (PT SMI-PEN) yang dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.36, N.37**

3. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp10.233.719.426.349,30 mengalami kenaikan senilai Rp681.468.490.631,36 atau 7,13% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2020 senilai Rp9.552.250.935.717,94.

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer,



dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terealisasi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel d.1 Pendapatan - LO

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.343.668.711.158,00	1.253.286.852.878,54
2	Pendapatan Transfer - LO	4.000.655.446.445,00	4.171.362.593.723,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	298.200.520.155,20	193.939.021.812,22
Jumlah		5.642.524.677.758,20	5.618.588.468.413,76

Masing-masing Akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Tabel 1.a Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	957.891.853.445,00	945.480.348.423,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	69.563.749.732,45	35.098.437.744,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diolsahkan - LO	70.180.239.699,67	75.923.131.476,18
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	246.032.868.280,88	196.784.935.234,37
Jumlah		1.343.668.711.158,00	1.253.286.852.878,54

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp1.343.668.711.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

Masing-masing Realisasi PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh 2 (dua) SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni: Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual di mana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah seluruh pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp957.891.853.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.a.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	235.562.731.188,00	225.852.776.738,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	176.218.560.037,00	167.990.359.037,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	168.310.347.444,00	156.896.654.510,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	881.901.204,00	600.499.044,00
5	Pajak Rokok - LO	376.938.313.574,00	394.140.059.094,00
Jumlah		957.891.853.445,00	945.480.348.423,00



2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 21 (dua puluh satu) SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 terealisasi senilai Rp69.563.749.732,45 dengan rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 1.a.2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.040.000,00	979.340.000,00
2	Dinas Kesehatan	12.115.499.483,00	3.261.303.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	558.129.500,00	565.024.400,00
4	Dinas Sosial	232.650.000,00	140.460.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		54.600.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.176.198.077,00	1.257.155.064,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.660.000,00	25.100.000,00
8	Dinas Perhubungan	988.374.000,00	836.399.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.000.000,00	15.750.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153.050.000,00	242.850.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	145.969.000,00	140.449.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.240.750,00	11.592.250,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.689.805.637,45	4.186.123.964,00
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	124.194.000,00	160.509.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.265.572.785,00	1.253.175.200,00
16	Dinas Peternakan	5.683.453.000,00	4.826.923.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.400.000,00	114.905.000,00
18	Biro Umum	294.270.000,00	153.200.000,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	541.602.500,00	487.991.686,99
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.239.291.000,00	16.340.487.000,00
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	63.900.000,00	43.100.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.450.000,00	
Jumlah		69.563.749.732,45	35.098.437.744,99

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Realisasi pada tahun 2021 senilai Rp70.180.239.699,67 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.a.3 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
PT ASKnda	239.619.288,00	240.770.936,00
PT Jamknda	11.989.045.042,63	8.995.345.610,16
PT Fibamora	922.726.236,11	1.258.426.746,00
PT Bank NTT	57.028.849.132,93	65.428.588.184,02
Jumlah	70.180.239.699,67	75.923.131.476,18

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD senilai Rp246.032.868.280,88 untuk periode tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.a.4 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.393.163.416,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	52.951.744.805,89	58.436.100.398,34
Penerimaan Jasa Giro - LO	4.128.171.235,78	2.885.147.469,20
Pendapatan Bunga - LO	512.633.707,00	7.066.134.500,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	26.078.591.673,43	1.214.379.140,57
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	14.458.488.176,27	5.546.935.787,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	7.287.618.483,00	8.340.254.681,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	12.967.248.597,14	5.828.911.323,00
Pendapatan BLUD - LO	124.255.208.188,37	102.976.995.889,66
Lain-lain PAD yang Sah lainnya	-	4.490.076.045,60
Jumlah	246.032.868.280,88	196.784.935.234,37

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 1.a.4.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	123.988.212.681,73	101.706.465.249,66
2	Dinas Pekerjaan Umum dan	266.995.304,64	1.270.530.640,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283.544.050,00	-
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	63.368.962.654,89	66.776.355.079,34
5	Badan Keuangan Daerah	58.145.133.389,62	27.031.584.265,37
	Jumlah	246.032.868.280,88	196.784.935.234,37

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun 2021 senilai Rp4.000.655.446.445,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.b Rincian Pendapatan Transfer - LO



Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Dana Perimbangan-LO		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	77.108.302.308,00	67.539.025.428,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.726.712.089.000,00	1.716.206.146.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	2.189.395.443.137,00	2.368.294.056.295,00
Jumlah	3.993.215.834.445,00	4.152.039.227.723,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LO		
Dana Insentif Daerah – LO	7.439.612.000,00	19.323.366.000,00
Jumlah	7.439.612.000,00	19.323.366.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	4.000.655.446.445,00	4.171.362.593.723,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp298.200.520.155,20. Dari total Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat senilai Rp4.361.660.431,00 merupakan Hibah Obat dan Alat Kesehatan dari Pemerintah. Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai berikut:

Tabel 1.c Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	110.786.183.193,20	191.927.212.988,22
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	1.415.046.000,00	
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO		819.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan – LO		1.192.808.824,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	175.190.556.701,00	
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	10.808.734.251,00	
Jumlah	298.200.520.155,20	193.939.021.812,22

2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar pada TA 2021, Beban-LO Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp5.229.773.055.927,78 terdiri dari (a) Beban Operasi senilai Rp4.241.699.746.916,02 (b) Beban Penyusutan dan Amortisasi senilai Rp480.848.224.751,45 (c) Beban Transfer senilai Rp502.573.266.323,00 (d) Beban Tidak Terduga senilai Rp3.400.655.793,00 dan (e) Defisit Non Operasional senilai Rp1.251.162.144,31. Rincian Beban tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Operasi – LO

Beban Operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp4.241.699.746.916,02 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.a Rincian Beban Operasi – LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Pegawai - LO	1.635.960.479.600,00	1.441.795.255.173,38
Beban Barang dan Jasa - LO	1.178.568.950.320,78	1.302.606.937.686,73
Beban Bunga	1.952.333.753,00	6.945.598.966,90
Beban Hibah	1.381.783.647.440,00	1.329.334.450.800,00
Beban Bantuan Sosial	42.456.177.179,00	42.531.894.499,00
Beban Penyisihan Piutang	978.158.623,24	9.191.520.395,41
Jumlah	4.241.899.746.916,02	4.132.405.455.521,42

1) Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai – LO senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi senilai Rp1.635.960.479.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.a.1 Rincian Beban Pegawai - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	920.673.933.937,00	949.795.881.081,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	282.450.862.474,00	460.207.486.928,38
Uang Lembur - LO	-	10.983.620.100,00
Beban Penerimaan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	288.357.480.907,00	
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	53.809.174.624,00	
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	242.532.736,00	
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	2.742.986.600,00	13.748.660.769,00
Belanja Pegawai BOS - LO	80.556.714.491,00	
Belanja Pegawai BLUD - LO	7.126.793.831,00	7.059.628.295,00
Jumlah	1.635.960.479.600,00	1.441.795.255.173,38

2) Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi senilai Rp1.178.568.950.320,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.a.2 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Barang	245.444.563.950,64	190.442.944.734,04
Beban Jasa	488.936.238.173,88	391.851.971.474,17
Beban Pemeliharaan	16.925.016.349,00	12.052.611.521,00
Beban Perjalanan Dinas	101.515.231.988,00	151.857.419.670,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.514.102.446,00	216.090.685.860,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	185.475.533.168,00	234.476.165.974,00
Beban Pendidikan bagi Anak Pantti		787.914.500,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.758.264.245,26	105.047.223.953,52
Jumlah	1.178.568.950.320,78	1.302.606.937.686,73



3) Beban Bunga - LO

Beban Bunga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp1.952.333.753,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp6.945.596.966,90. Beban bunga Tahun 2021 merupakan beban bunga pinjaman PT SMI-PEN yang belum diatribusikan ke Aset Tetap karena Aset Tetap yang diperoleh dari Pinjaman PT SMI-PEN belum semua dapat dijabarkan.

4) Beban Hibah-LO

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp1.381.783.647.440,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.a.4 Rincian Beban Hibah-LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.908.368.499,00	1.500.000.000,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat		29.648.000.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	28.959.890.000,00	
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	105.817.850.141,00	
Beban Hibah Dana BOS	1.232.420.718.000,00	1.295.509.630.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00
Jumlah	1.381.783.647.440,00	1.329.334.450.800,00

5) Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp42.456.177.179,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.a.5 Rincian Beban bantuan Sosial - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.224.000.000,00	
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dan/atau Keluarga		20.966.374.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	6.250.000.000,00	21.565.320.499,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.769.290.000,00	
Beban Bantuan Sosial kepada Pemerintah	32.212.887.179,00	
Jumlah	42.456.177.179,00	42.531.694.499,00

6) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp978.158.623,24 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.a.6 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.260.724,00	426.845.261,30
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	104.800.000,00	538.200.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	636.102.934,67	8.210.134.293,70
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	17.994.964,57	16.340.840,41
Jumlah	978.158.623,24	9.191.520.395,41

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp480.848.224.751,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.b Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.461.568.645,88	129.922.412.179,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.206.014.844,15	35.883.578.083,60
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	264.971.474.637,15	214.374.030.993,51
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29.521.200,00	421.005.100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.179.645.424,27	1.919.085.471,32
Jumlah	480.848.224.751,45	382.520.111.827,43

c. Beban Transfer – LO

Beban Transfer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp502.573.266.323,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp491.458.704.731,00. Beban Transfer 2021 yang terdiri dari:

1. Beban Bagi Hasil senilai Rp492.573.266.323,00 merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
2. Beban Bantuan Keuangan senilai Rp10.000.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Pembangunan ruas jalan.

d. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga adalah Beban tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Tak Terduga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 senilai Rp3.400.655.793,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp208.455.722.555,35. Beban Tak Terduga yang terdiri dari:

Tabel 2.d Rincian Beban Tak Terduga - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Beban Pegawai	634.050.000	6.042.095.900,00
Beban Barang dan Jasa	2.766.605.793	202.413.626.855,35
Jumlah	3.400.655.793	208.455.722.555,35

Total nilai Beban Tak Terduga sebesar Rp3.400.655.793,00 merupakan beban akibat kejadian luar biasa Pemerintah Provinsi NTT yang tidak dapat diatribusikan ke pos beban sesuai substansinya.

**e. Surplus Non Operasional**

Surplus Non Operasional tahun 2021 senilai Rp1.979,54 tersebut merupakan Surplus Investasi Non Permanen/kelebihan pembayaran pengembalian Investasi Non Permanen Roda 4 (empat).

f. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 senilai Rp1.251.162.144,31 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp2.931.480.668,51. Defisit Non Operasional yang terdiri dari:

Tabel 2.f Rincian Defisit Non Operasional - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	861.600,00	1.160.648.638,97
Defisit Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	861.600,00	1.160.648.638,97
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.250.300.544,31	1.770.832.029,54
Defisit Penurunan Nilai Investasi	1.250.300.544,00	1.770.832.029,54
Defisit Non Operasional Kredit Roda Dua	0,31	-
Defisit Non Operasional	1.251.162.144,31	2.931.480.668,51

g. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) - LO dari kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode kegiatan operasi. Kemudian ditambah dengan Surplus Non Operasional - LO lalu dikurangi Defisit Non Operasional - LO. Surplus/(Defisit) - LO selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp412.751.623.809,96 dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp400.816.993.110,05. Surplus/(defisit) - LO diperoleh dari:

Tabel 2.g Rincian Defisit Non Operasional - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Pendapatan - LO	5.642.524.679.737,74	5.618.588.468.413,76
Beban Operasi - LO	5.229.773.055.927,78	5.217.771.475.303,71
Surplus/(Defisit) - LO	412.751.623.809,96	400.816.993.110,05

E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi NTT adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama 1 (satu) periode akuntansi dan saldokas pada tanggal pelaporan serta diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2021 Rp5.309.053.709.192,51	31 Desember 2020 Rp5.419.935.156.637,49
--	--	--

Jumlah senilai Rp5.309.053.709.192,51 merupakan jumlah Arus Kas Masuk ke Bendahara Umum Daerah dari keseluruhan aktivitas Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel e.1 Rincian LAK Masuk Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	925.862.559.388,00
2	Penerimaan Retribusi daerah	89.890.857.732,45
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	64.982.172.050,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173.903.896.302,06
5	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.108.302.308,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.726.712.089.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.189.395.443.137,00
8	Dana Insentif Daerah	7.439.612.000,00
9	Penerimaan Hibah	73.758.777.275,00
Jumlah Arus Kas Masuk		5.309.053.709.192,51

- 2) **Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi** 31 Desember 2021
Rp4.605.540.283.332,69 31 Desember 2020
Rp4.728.472.737.778,84

Jumlah senilai Rp4.605.540.283.332,69 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.2 Rincian LAK Keluar Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.606.464.234.033,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.078.288.386.249,19
3	Pembayaran Bunga	17.483.698.421,50
4	Pembayaran Hibah	1.347.483.386.922,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	10.243.290.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	135.805.036.685,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab./Kota	397.772.251.022,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.605.540.283.332,69

- 3) **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** 31 Desember 2021
Rp703.543.425.859,82 31 Desember 2020
Rp691.462.418.858,65

Jumlah senilai Rp703.543.425.859,82 merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021.

- 4) **Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi** 31 Desember 2021
Rp6.798.509.097,00 31 Desember 2020
Rp0,00

Selama Tahun 2021, Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah senilai Rp6.798.509.097,00 yang merupakan penjualan atas aset tetap peralatan kantor yang telah berakhir masa manfaatnya senilai Rp3.393.163.416,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp3.405.345.681,00.

- 5) **Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi** 31 Desember 2021
Rp1.033.057.622.800,00 31 Desember 2020
Rp1.053.785.278.414,80

Jumlah senilai Rp1.033.057.622.800,00 merupakan jumlah Arus Kas Keluar untuk memperoleh Aset Tetap dan Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Handwritten signature/initials



Timur, Tahun Anggaran 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.5 Rincian LAK Keluar Aktivitas investasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perolehan Tanah	147.952.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	185.901.613.833,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	135.344.543.385,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.412.496.697,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.451.016.885,00
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	127.300.000.000,00
7	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.033.057.622.800,00

- 6) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
| (Rp1.026.259.113.703,00) | (Rp1.053.785.278.414,80) |

Jumlah senilai (Rp1.026.259.113.703,00) merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

- 7) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
| Rp431.234.385.650,00 | Rp148.076.453.999,00 |

Jumlah senilai Rp431.234.385.650,00 merupakan jumlah Arus Pembiayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Pinjaman Dalam Daerah - Lembaga Keuangan Non Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.7 Rincian Pinjaman Dalam Daerah - Lembaga Keuangan Non Bank

No	Uraian	Nilai
1	PT SMI - Regular	180.455.945.650,00
2	PT SMI - PEN	250.778.440.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		431.234.385.650,00

- 8) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
| Rp114.357.098.564,20 | Rp0,00 |

Selama Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp114.357.098.564,20 yang digunakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank (PT Bank NTT) senilai Rp71.958.361.000,20 dan Lembaga Keuangan Non Bank (PT SMI - Regular) senilai Rp42.398.737.564,00.

- 9) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
| Rp316.877.287.085,80 | Rp148.076.453.999,00 |

Jumlah senilai Rp316.877.287.085,80 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan.



10)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2021 Rp123.320.364.933,00	31 Desember 2020 Rp259.615.277.883,00
-----	--	--	--

Jumlah senilai Rp123.320.364.933,00 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

11)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2021 Rp123.320.364.933,00	31 Desember 2020 Rp259.615.277.883,00
-----	---	--	--

Jumlah senilai Rp123.320.364.933,00 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

12)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2021 Rp0,00	31 Desember 2020 Rp0,00
-----	---	--	--

Selama Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara tidak memiliki selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dengan Arus Kas Keluar.

13)	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	31 Desember 2021 Rp5.838.400.757,38
-----	--	--

Selama Tahun 2021 terjadi kenaikan kas senilai Rp5.838.400.757,38 yang diperoleh dari saldo awal senilai Rp68.383.358.383,99 dikurangi saldo akhir tahun 2021 senilai Rp62.54.957.626,61 dengan rincian saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	28.715.368.773,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	580.908.361,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	31.493.475.083,31
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	136.586.623,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.618.620.786,00
Jumlah	62.544.957.626,61

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir keadaan per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal senilai Rp9.552.250.935.717,94 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2021.
2. Surplus/(Defisit) LO senilai Rp412.751.623.809,96 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2021



sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

- a. Dampak Perubahan Nilai Persediaan senilai Rp532.511.593,51 merupakan koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari perolehan BTT dikurangi nilai persediaan yang diakui sebagai Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel f.3.a Rincian Dampak Perubahan Persediaan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari BTT RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	2.915.507.607,93	
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari BTT pada Dinas Kesehatan	565.459.593,51	
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat pindah ke Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		16.348.000,00
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat pindah ke Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan		16.600.000,00
Koreksi kurang Nilai Persediaan akibat Penambahan Nilai Persediaan dari BTT di Badan Keuangan Daerah		2.915.507.607,93
Jumlah	3.480.967.201,44	2.948.455.607,93
Jumlah Bersih Pengurang Ekuitas		532.511.593,51

- b. Dampak Perubahan Nilai Kas senilai (Rp0,41) yang merupakan koreksi saldo awal pada BLUD SPAM;
- c. Dampak Perubahan Aset Tetap senilai Rp172.922.219.298,21 merupakan penambahan Aset dikurangi Koreksi Nilai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel f.3.c Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.256.428,20	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.030.898.245,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari BTT pada Dinas Kesehatan	32.140.649.336,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	27.343.940.158,50	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Tetap yang berasal dari BTT pada Satuan Polisi Pamong Praja	27.000.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.810.982,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Tetap yang berasal dari BTT pada Dinas Sosial	320.000.000,00	
koreksi Nilai Hibah dan Kementerian dan Aset P2D dikurangi Aset sumur Bor yang tidak dikerjakan Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.417.580.595,00	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		289.500.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	454.848.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.269.500.000,00	



Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		759.883.200,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat Aset Tetap Lainnya (Hewan Mati) pada Dinas Peternakan		1.870.120.430,00
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.600.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat tukar tambah Aset pada Biro Umum	6.408.806.900,00	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan		219.700.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Biro Pemerintahan	13.480.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	5.351.447.000,00	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap akibat Penambahan Aset Tetap BTT pada SKPD di Badan Keuangan Daerah		58.071.190.654,49
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap (kurang catat mobil Kaban) pada Badan Kepegawaian Daerah	253.444.999,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Inspektorat Daerah	340.000.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah yang sebelumnya bernilai Rp00,00 dan Rp1,00 pada SMA/SMK Negeri	136.584.346.939,00	
Jumlah	234.112.613.582,70	61.190.394.284,49
Jumlah Bersih Pengurang Ekuitas		172.922.219.298,21

- d. Dampak perubahan atas Penyusutan senilai (Rp624.553.760,34) merupakan koreksi terhadap saldo awal Akumulasi Penyusutan pada:

Tabel f.3.d Rincian Dampak Perubahan Penyusutan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.130.808.355,72	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang		75.000.000,00
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan akibat barang Rusak Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat		297.240.200,00
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.897.308.545,81
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan yang berasal dari Penambahan Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	231.000.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Amortisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika		33.279.750,00
Koreksi Kurang akibat Aset Tetap yang Mulai ke SKPD dan Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		506.638.800,00
Koreksi Saldo Awal Nilai Penyusutan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga		231.000.000,00
Koreksi Nilai Penyusutan akibat rekas antar SKPD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.887.040,00	
Koreksi saldo awal Nilai Penyusutan pada Biro Umum		35.488.621,25
Koreksi Nilai Kapitalisasi pada Biro Organisasi	23.750.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	219.700.000,00	
Koreksi saldo awal Nilai Penyusutan pada Biro Pengadaan Barang dan jasa	160.000,00	
Selisih Koreksi akibat rekas antar SKPD dan Koreksi Nilai Aset Tetap Badan Pendapatan dan Aset Daerah		38.087.040,00



Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Koreksi Kurang Catat Mobil Kaban pada Badan Kepegawaian Daerah		263.444.999,00
Koreksi Nilai Penyusutan ATL pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	91.500.000,00	
Koreksi Nilai Kapitalisasi pada Inspektorat Daerah	128.600,00	
Jumlah	3.752.934.195,72	4.377.487.956,06
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas		624.553.760,34

- e. Dampak Perubahan atas Investasi senilai Rp105.181.020.902,72 merupakan koreksi saldo awal investasi akibat perhitungan Deviden dan nilai ekuitas Tahun sebelumnya, investasi yang dikoreksi antara lain:

Tabel f.3.e Rincian Dampak Perubahan Investasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Investasi pada Bank NTT	106.279.691.068,61
2	Koreksi Investasi pada PT Jamkrida	2.875.250.535,36
3	Koreksi Investasi pada PT Flobamor	(4.054.600.702,79)
4	Koreksi Investasi pada PT KI Bolok	80.680.001,54
	Jumlah	105.181.020.902,72

- f. Dampak Perubahan atas Utang senilai Rp36.422.062,79 merupakan Utang jasa Pelayanan pada BLUD RSUD senilai Rp36.237.023,20 dan Utang belanja pegawai pada BLUD SPAM senilai Rp185.040,00 dan Pembayaran Pokok Utang pada PT Bank NTT senilai Rp00,41.
- g. Dampak Perubahan atas Kapitalisasi senilai (Rp523.538.529,77) merupakan koreksi atas nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai (Rp522.196.329,77). Koreksi nilai Kapitalisasi Aset Jalan, Irigasi dan Jembatan pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp500.000,00 dan Koreksi nilai Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai (Rp90.000,00) dan Dinas Komunikasi dan Informatika senilai (Rp752.200,00). Koreksi nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD:

Tabel f.3.g Rincian Dampak Perubahan Kapitalisasi

SKPD	Nilai (Rp)
RSU Prof. Dr.W.Z. Johannes	(28.595.277,77)
Dinas Kesehatan	(114.137.600,00)
Dinas Pekerjaan Umum Umum dan Perumahan Rakyat	(3.986.400,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(4.320.000,00)
Dinas Sosial	(32.165.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(140.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.521.336,00)
Dinas Perhubungan	(4.915.300,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(9.830.000,00)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.272.800,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(20.372.500,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(255.000,00)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(4.612.000,00)



SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(179.000,00)
Dinas Peternakan	(800.000,00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(2.324.500,00)
Biro Umum	(3.525.000,00)
Biro Organisasi	(23.750.000,00)
Biro Ekonomi dan Kerjasama	(1.428.000,00)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(400.000,00)
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(48.281.116,00)
Badan Keuangan Daerah	(18.963.000,00)
Badan Kepegawaian Daerah	(3.874.000,00)
Badan pengembangan Sumber Daya Manusia	(14.000.000,00)
Badan penghubung Prov. NTT di Jakarta	(116.586.000,00)
Inspektorat Daerah	(46.282.500,00)
Badan Kesatuan bangsa dan Politik	(1.680.000,00)
Jumlah	(522.196.329,77)

- h. Koreksi atas nilai Penyisihan Piutang karena telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp8.226.290.666,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel f.3.h Rincian Dampak Perubahan Penyisihan Piutang

SKPD	Nilai (Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	8.409.289.304,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	80.333.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.650.000,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(281.322.477,92)
Badan Keuangan Daerah	16.340.840,41
Jumlah	8.226.290.666,49

- i. Dampak Perubahan atas Aset Lain senilai (Rp34.229.774.414,80) merupakan aset lain-lain yang dikoreksi antara lain:

Tabel f.3.i Rincian Dampak Perubahan atas Aset Lain

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185.000,00	Aset RB
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(5.055.967.049,00)	Aset Untuk dihapus
Badan Keuangan Daerah	(29.187.992.365,80)	Koreksi TPTGR
Jumlah	(34.229.774.414,80)	

- j. Dampak Perubahan atas Piutang merupakan koreksi atas saldo awal Piutang senilai Rp17.196.269.003,00 pada SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Senilai Rp439.319.080,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Senilai Rp16.756.949.923,00.
- k. Ekuitas Akhir senilai Rp10.233.719.426.349,30 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021.





G. INFORMASI TAMBAHAN

I. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Penerima dan jumlah dana Bos pada setiap satuan pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi dana Bos setiap Provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan Dana Bos setiap Satdik pada APBD Provinsi dijabarkan melalui program dan kegiatan serta belanja Hibah;

- Dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Dalam bentuk Hibah bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SD, SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bos dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2020, Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Penerimaan Dana Bos pada APBD Provinsi tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT, Penerimaan Dana Bos tersebut ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI langsung ke rekening sekolah, baik Satdikdas maupun Satdikmen (Negeri maupun Swasta). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pengakuan realisasi pendapatan Dana Bos oleh Provinsi NTT dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) oleh BUD, setelah menerima notifikasi dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Kupang. Total Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2021 sesuai 12-SP2T yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD senilai Rp1.551.825.939.000,00 atau 97,14% dari total anggaran senilai Rp1.597.549.130.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel g.1 Rincian SP2T Pendapatan BOS

No.	Tanggal SP2D	Nomor	Nilai (Rp)
1	4 Juni 2021	971/1074/BKUD4.1/2021	351.277.880.000,00
2	4 Juni 2021	971/1074/BKUD4.1/2021	105.718.420.000,00
3	4 Juni 2021	971/1074/BKUD4.1/2021	634.208.000,00
4	4 Juni 2021	971/1074/BKUD4.1/2021	468.189.892.000,00
5	25 Agustus 2021	971/1781/BKUD4.1/2021	140.405.464.000,00
6	25 Agustus 2021	971/1781/BKUD4.1/2021	1.387.473.000,00
7	2 Desember 2021	971/3522/BKUD4.1/2021	33.150.000.000,00
8	2 Desember 2021	971/3523/BKUD4.1/2021	414.249.000,00
9	2 Desember 2021	971/3524/BKUD4.1/2021	398.970.234.000,00



No.	Tanggal SP2D	Nomor	Nilai (Rp)
10	2 Desember 2021	971/3525/BKUD4.1/2021	28.783.791.000,00
11	2 Desember 2021	971/3526/BKUD4.1/2021	5.070.000,00
12	2 Desember 2021	971/3527/BKUD4.1/2021	22.888.278.000,00
Total			1.551.825.939.000,00

Dari total realisasi pendapatan, berdasarkan penetapan SP2T sebagaimana di atas, dijabarkan untuk Belanja Hibah dan Belanja Program Kegiatan, pada APBD Provinsi NTT TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana BOS melalui Belanja Hibah

Penyaluran Dana BOS, melalui Belanja Hibah pada APBD Provinsi NTT dialokasikan senilai Rp1.286.548.485.479,00 dan terealisasi senilai Rp1.231.324.238.000,00 atau 95,71% dengan rincian:

- 1) Total realisasi Belanja Hibah Dana BOS kepada 22 Kab/Kota adalah senilai RpRp1.231.324.238.000,00, terdiri dari Satdikdas Negeri/Swasta yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota senilai Rp1.060.185.123.000,00 dan Satdikmen Swasta yang menjadi kewenangan Provinsi terealisasi senilai Rp171.139.115.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel g.1.1 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS

No	Satuan Pendidikan (Satdik)	Rincian	Nilai (Rp)
1	Dasar Negeri	SD Negeri (22 Kab/Kota)	414.615.676.000,00
		SMP Negeri (22 Kab/Kota)	310.444.649.000,00
2	Dasar Swasta	SD Swasta (22 Kab/Kota)	241.140.068.000,00
		SMP Swasta (22 Kab/Kota)	93.984.730.000,00
3	Menengah Swasta	SMA Swasta (22 Kab/Kota)	95.720.392.000,00
		SMK Swasta (22 Kab/Kota)	72.963.048.000,00
		SLB Swasta (22 Kab/Kota)	2.455.675.000,00
Total			1.231.324.238.000,00

- 2) Tambahan realisasi belanja Hibah Dana BOS adalah Sisa Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.210.440.000,00 terealisasi Senilai Rp1.096.480.000,00 atau 90,59%, diperuntukan bagi sekolah-sekolah swasta (SD, SMP, SMA) yang gagal transfer tahun 2019. Terdapat sisa dana BOS senilai Rp113.960.000,00 yang belum disalurkan ke rekening sekolah penerima. Terhadap sisa dana BOS tahun 2019 tersebut akan dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera disalurkan ke rekening penerima.
- 3) Pengakuan Belanja Hibah pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri/Swasta yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan Menengah (SMA, SMK, SLB) Swasta yang menjadi kewenangan Provinsi, ditetapkan dengan Surat Pengesahan Belanja Hibah (SP2H) yang terbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD Provinsi. (Rincian lengkap Realisasi Belanja Hibah Dana BOS, lihat lampiran).



b. Belanja BOS melalui program dan kegiatan

Penyaluran Dana BOS melalui program dan kegiatan dialokasikan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, total anggaran senilai Rp320.464.004.236,00 dan teralisasi (transfer) senilai Rp328.754.620.145,00 atau 102,59% berdasarkan SP2T yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku BUD. Belanja BOS melalui program/kegiatan bagi SMA, SMK, SLB Negeri se- Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel g.1.2 Rincian Belanja BOS SMA, SMK SLB Negeri se-Provinsi NTT

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	SMA Negeri (22 Kab/Kota)	220.852.220.958,00
2	SMK Negeri (22 Kab/Kota)	91.567.023.278,00
3	SLB Negeri (22 Kab/Kota)	8.044.760.000,00
Jumlah		320.464.004.236,00

Selain Dana BOS (murni tahun 2021) masih terdapat Sisa Dana BOS (SiLPA) tahun 2020 yang dianggarkan kembali melalui program/kegiatan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA, SMK, SLB) yaitu senilai Rp8.252.919.145,00. Rincian Realisasi Dana BOS melalui program/kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel g.1.3 Rincian Realisasi Dana BOS

No	Uraian	Anggaran (Rp)	SiLPA (Rp)	Regular (Rp)	Afirmasi (Rp)	Kinerja (Rp)	Jumlah (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
1	PENDAPATAN	328.754.620.145	8.252.919.145	317.361.701.000	1.150.000.000	1.990.000.000	328.754.620.145	0,00
2	BELANJA	320.464.004.236	7.863.063.587	316.249.058.372	1.090.698.400	1.943.181.000	327.135.999.359	(8.671.995.123)
2.1	BELANJA OPERASI	260.628.919.519	4.424.481.870	259.922.106.389	294.806.300	1.390.853.100	266.032.247.659	(5.403.326.140)
2.1.1	Belanja Pegawai	77.825.220.287	658.543.400	79.883.915.091	-	14.256.000	80.556.714.491	(2.731.466.204,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	182.803.699.232	3.765.938.470	180.038.191.298	294.806.300	1.376.597.100	185.475.533.168	(2.671.830.938,00)
2.2	BELANJA MODAL	59.835.084.717	3.428.581.717	56.326.951.983	795.890.100	552.327.900	61.103.751.790	(1.268.866.983)
2.2.2	Peralatan dan Mesin	59.350.747.917	3.103.008.277	33.007.728.192	727.167.700	462.642.600	37.300.547.069	22.050.200.848,00
2.2.3	Gedung dan Bangunan		17.000.000	81.974.000			78.974.000	(78.974.000,00)
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jembatan			54.340.000			54.340.000	(54.340.000,00)
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	484.336.800	308.573.440	23.202.909.791	68.722.400	89.685.000	23.669.890.631	(23.185.553.831,00)
	SISA DANA	8.290.615.909	399.855.558	1.112.642.628	59.303.600	48.819.000	1.618.620.786	6.671.995.123

Sesuai tabel di atas, maka sisa dana BOS 2021 adalah senilai Rp1.618.620.786,00 (Rp328.754.620.145,00 – Rp327.135.999.359,00) dan pengakuan Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Modal Senilai Rp61.103.751.700,00. Rincian sisa SiLPA senilai Rp1.618.620.786,00 terdiri dari:



Tabel g.1.4 Rincian Sisa SILPA BOS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa Dana BOS tahun 2020	399.855.558,00
2	BOS Reguler tahun 2021	1.112.642.628,00
3	BOS Kinerja tahun 2021	59.303.600,00
4	BOS Afimasi tahun 2021	46.819.000,00
Total		1.618.620.786,00

2. BELANJA TIDAK TERDUGA

Dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) diutamakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat dan penanganan pasca Siklon Tropis Seroja. Dari hasil *refocussing* kegiatan dan realokasi dan anggaran terhadap APBD tahun anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp153.507.896.803,00 yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19 senilai Rp142.525.477.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel g.2.1 Rincian Anggaran BTT

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penanganan Kesehatan	103.941.797.400,00
2	Penanganan Dampak Ekonomi	1.285.430.000,00
3	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	3.020.000.000,00
4	Penanganan Pasca Siklon Tropis Seroja	14.282.920.500,00
5	Lain-lain	19.995.329.853,00
Total		142.525.477.753,00

Dari total anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga sesuai pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Senilai Rp142.525.477.753,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur senilai Rp135.775.036.685,00 atau 95,26%. Pelaksanaan penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran COVID-19 pada Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pengaman Jaring Sosial adalah senilai Rp102.898.015.959,00 atau 57,09% dari total alokasi anggaran senilai Rp180.247.227.400,00 sedangkan realisasi pelaksanaan penanganan Pasca Siklon Tropis Seroja senilai Rp13.794.428.075,00 atau 96,58% dari alokasi anggaran senilai Rp14.282.920.500,00 yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD fungsional terkait *Job Description* atau tugas SKPD. Dari Total belanja tak terduga sebesar Rp135.775.036.685,00 telah diatribusikan ke masing-masing beban sesuai dengan sifat atau substansinya, dikarenakan tidak seluruhnya merupakan kejadian luar biasa sehingga dari total Tak Terduga *gross* sebelum diatribusikan adalah senilai Rp135.775.036.685,00 yang diakui sebagai beban tak terduga sebesar Rp3.400.655.793,00 dan atribusi antara lain menjadi Beban



Pegawai senilai Rp26.344.918.086,00 dan Beban Barang dan Jasa senilai Rp58.429.361.685,07 dan aset tetap sebesar Rp43.609.939.263,00 serta Persediaan sebesar Rp3.990.161.857,93.

Tabel g.2.2 Daftar Realisasi Belanja Tidak Terduga, Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

NO	URAIAN	SKPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	SK Gubernur NTT Nomor: 900/20/Bkud4.2/2021, Tanggal 15 Januari 2021 (Tahap I)	Dinas Kesehatan	43.912.178.000	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/152/Bkud4/2021, Tanggal 19 Juli 2021 (Revisi Lampiran Tahap I)	Dinas Kesehatan	-	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/158/Bkud4/2021, Tanggal 26 Juli 2021 (Tahap II)	Dinas Kesehatan	12.526.200.000	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/212/Bkud4/2021, Tanggal 23 September 2021 (Revisi Lampiran Tahap I & Tahap II)	Dinas Kesehatan	-	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/251/Bkud4/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 (Revisi Lampiran Tahap I & II)	Dinas Kesehatan	-	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/261/Bkud4/2021, Tanggal 25 November 2021 (Tahap III)	Dinas Kesehatan	3.205.000.000	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/276/Bkud4/2021, Tanggal 16 Desember 2021 (Revisi Tahap III)	Dinas Kesehatan	-	Penanganan Covid-19
	Jumlah		59.643.378.000	
2	SK Gubernur NTT Nomor: 900/23/Bkud4.2/2021, Tanggal 18 Januari 2021 (Tahap I)	RSUD		Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/43/Bkud4/2021, Tanggal 26 Februari 2021 (Revisi Lampiran Tahap I)	RSUD	20.000.000.000	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/123/Bkud4/2021, Tanggal 2 Juni 2021 (Revisi Ke 2 Lampiran Tahap I)	RSUD		Penanganan Covid-19
3	SK Gubernur NTT Nomor: 900/157/Bkud4/2021, Tanggal 26 Juli 2021 (Tahap II)	RSUD	21.000.000.000	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/189/Bkud4/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 (Revisi Lampiran Tahap II)	RSUD		Penanganan Covid-19
	Jumlah		41.000.000.000	
4	SK Gubernur NTT Nomor: 900/26/Bkud4/2021, Tanggal 25 Januari 2021	SATPOL PP		Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/188/Bkud4/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 (Revisi Lampiran)	SATPOL PP		Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/254/Bkud4/2021, Tanggal 9 November 2021 (Revisi Lampiran Ke 2)	SATPOL PP	1.296.534.600	Penanganan Covid-19
	SK Gubernur NTT Nomor: 900/277/Bkud4/2021, Tanggal 16 Desember 2021 (Revisi Lampiran Ke 3)	SATPOL PP		Penanganan Covid-19



NO	URAIAN	SKPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
5	SK GUBERNUR NTT NOMOR: 900/31.A/BKUD4/2021, TANGGAL 1 FEBRUARI 2021	Dinas Kominfo	398.069.000	Penanganan Covid-19
6	SK GUBERNUR NTT NOMOR: 900/31.B/BKUD4/2021, TANGGAL 3 FEBRUARI 2021	PMI	216.750.000	Penanganan Covid-19
7	SK Gubernur NTT Nomor: 900/38/Bkud4/2021, Tanggal 10 Februari 2021	BPDB	778.017.800	Penanganan Covid-19
8	SK Gubernur NTT Nomor: 900/39/Bkud4/2021, Tanggal 10 Februari 2021	Biro Pemerintahan	609.048.000	Penanganan Covid-19
-	SK Gubernur NTT Nomor: 900/187/Bkud4/2021, Tanggal 20 Agustus 2021 (Revisi Lampiran)	Biro Pemerintahan		Penanganan Covid-19
9	SK Gubernur NTT Nomor: 900/151/Bkud4/2021, Tanggal 19 Juli 2021	Dinas Pertanian	1.285.430.000	Penanganan Covid-19 (Pendanaan dalam Rangka Pembelian Bawang Merah dan Kacang Hijau Petani di TTS Prov. NTT)
10	SK GUBERNUR NTT NOMOR: 900/282.A/BKUD4/2021, TANGGAL 21 DESEMBER 2021	Dinas Sosial	1.000.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
11	SK Gubernur NTT Nomor: 900/284/Bkud4/2021, Tanggal 22 Desember 2021	Dinas Sosial	2.020.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
12	SK Gubernur NTT Nomor: 900/31/Bkud4/2021, Tanggal 1 Februari 2021	BPDB	57.500.000	Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Ije Lewotolok
13	SK Gubernur NTT Nomor: 900/81/Bkud4/2021, Tanggal 9 April 2021	BPDB	1.886.124.300	Penanganan Bencana Angin Seroja
14	SK Gubernur NTT Nomor: 900/85/Bkud4/2021, Tanggal 15 April 2021	Bapenda	505.000.000	Penanganan Bencana Angin Seroja (Penyedia Kebutuhan Air Bersih)
15	SK Gubernur NTT Nomor: 900/136/Bkud4/2021, Tanggal 23 Juni 2021	Biro Umum	10.266.102.700	Rehab Gedung Kantor
16	SK Gubernur NTT Nomor: 900/138/Bkud4/2021, Tanggal 1 Juli 2021	BPDB	1.275.693.600	Penanganan Pasca Bencana Dari Masa Transisi Darurat ke Pemulihan
17	SK Gubernur NTT Nomor: 900/181/Bkud4/2021, Tanggal 13 Agustus 2021	DISPORA	87.505.000	Penambahan Pasukan 45 Pada Acara PaSKibraka
18	SK Gubernur NTT Nomor: 900/159/Bkud4/2021, Tanggal 27 Juli 2021	BPDB	113.139.400	Pengembalian Sisa Dana Hibah
19	SK Gubernur NTT Nomor: 900/206/Bkud4/2021, Tanggal 14 September 2021	DISPORA	4.000.000.000	Tambahan Anggaran Untuk Kontingen Prov. NTT Pada Pon XX di Papua
20	SK Gubernur NTT Nomor: 900/255/Bkud4/2021, Tanggal 9 November 2021	Dinas ESDM	137.185.453	Pendanaan Pembayaran Pekerjaan Pengeboran Sumur Bor
21	SK Gubernur NTT Nomor: 900/262/Bkud4/2021, Tanggal 25 November 2021	DISPORA	10.450.000.000	Pemberian Bonus Bagi Atlet & Pelatih Peraih Medali dan Non Medali Pada Pon XX di Papua
22	SK Gubernur NTT Nomor: 900/263/Bkud4/2021, Tanggal 25 November 2021	DISPORA	4.600.000.000	Pemberian Bonus Bagi Atlet & Pelatih Peraih Medali dan Non Medali Pada



NO	URAIAN	SKPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
				Peparnas
23	SK Gubernur NTT Nomor: 900/265/Bkud4/2021, Tanggal 29 November 2021	Dinas Sosial	350.000.000	Rehab Gedung Logistik
24	SK Gubernur NTT Nomor: 900/257/Bkud4/2021, Tanggal 12 November 2021	Biro Administrasi Pimpinan	550.000.000	Pendanaan Pekerjaan Penyiaran Tentang Pelaksanaan Pembangunan Di Prov. NTT (PT Tempo)
JUMLAH			142.525.477.753	





Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

TABEL g.2.3 DAFTAR REALISASI SP2D DAN SPJ BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN ANGGARAN 2021

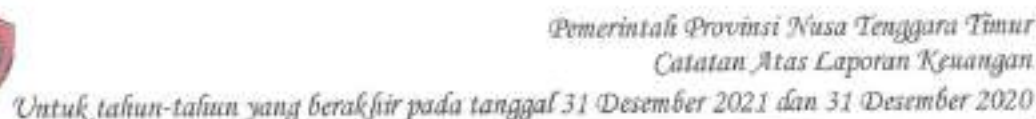
No	URAIAN	BELANJA OPERASI			REALISASI SP2D					TOTAL SP2D
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	JUMLAH	TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JI	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6	8	7	9	8(6+7+8)	10(5+9)
1	DINAS KESEHATAN	10.300.006.812	17.301.131.352	27.601.138.164		26.141.054.956	1.856.802.000	2.132.382.880	28.141.239.836	55.643.378.000.00
-	TAHAP I	4.438.802.591	14.446.384.002	18.885.186.593		18.554.301.706.00	1.801.802.000	2.103.377.000	24.061.880.706	43.937.467.899.00
-	TAHAP II	5.761.404.221	-	5.761.404.221		6.530.500.000.00	200.000.000	20.301.880	6.739.505.880	12.500.910.101.00
-	TAHAP III	-	2.834.146.750	2.834.146.750		75.833.230.00	271.000.000	-	898.833.230	5.325.000.000.00
2	RSUD, Prof. DR.W.J. Irianas	17.148.961.839	22.808.572.404	40.019.534.243		658.464.257	826.000.000	-	886.464.257	41.000.000.000
-	TAHAP I	4.148.261.030	15.472.116.078	19.620.377.108		102.892.887	326.000.000	-	428.892.887	20.000.000.000
-	TAHAP II	13.000.000.000	7.444.426.330	20.444.426.330		551.373.670	-	-	665.678.670	21.000.000.000
3	Satpol PP	-	1.269.534.600	1.269.534.600		27.000.000	-	-	27.000.000	1.296.534.600
4	Dinas Komunikasi & Informatika	-	208.000.000	208.000.000		-	-	-	-	208.000.000
5	Palang Merah Indonesia (PMI)	-	216.750.000	216.750.000		-	-	-	-	216.750.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Covid)	-	771.617.800	771.617.800		7.000.000	-	-	7.000.000	778.617.800
7	Biro Pemerintahan	-	595.548.000	595.548.000		13.300.000	-	-	13.300.000	608.848.000
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	1.285.430.000	1.285.430.000		-	-	-	-	1.285.430.000
		27.348.967.651	46.704.084.184	74.053.051.835	-	26.847.071.553	4.694.802.000	2.132.382.880	33.174.256.433	108.227.327.400
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Grupe)	-	57.500.000	57.500.000		-	-	-	-	57.500.000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (sewa)	-	1.886.124.300	1,886,124,300		-	-	-	-	1,886,124,300
11	Badan pendataan & Ases Daerah	-	505.000.000	505.000.000		-	-	-	-	505.000.000
12	Biro Umum	-	150.000.000	150.000.000		-	10.116.100.700	-	10.116.100.700	10,266,102,700
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (transit)	639.300.000	137.898.000	1,377,198,000		98.895.500	-	-	98,895,500	1,375,693,500
14	Dinas Kependudukan & Olahragra (paskibraka)	-	87.505.000	87,505,000		-	-	-	-	87,505,000
15	Pengembalian Hibah (BPBD)	-	113.139.400	113,139,400		-	-	-	-	113,139,400
16	Dinas Kependudukan & Olahragra (PON PAPUA)	-	4.000.000.000	4,000,000,000		-	-	-	-	4,000,000,000
17	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (sumur bor)	-	137.185.455	137,185,455		-	-	-	-	137,185,455
18	Dinas Kependudukan & Olahragra (Rona silet PON PAPUA)	-	10.450.000.000	10,450,000,000		-	-	-	-	10,450,000,000
19	Dinas Kependudukan & Olahragra (Paskibraka PAPUA)	-	4.600.000.000	4,600,000,000		-	-	-	-	4,600,000,000
20	DINAS SOSIAL	30.000.000	-	30,000,000		-	320.000.000	-	320,000,000	350,000,000
21	Biro Administrasi Pemiphan	-	550.000.000	550,000,000		-	-	-	-	550,000,000
22	Dinas Sosial (KUBE)	-	1.000.000.000	1,000,000,000		-	-	-	-	1,000,000,000
23	Dinas Sosial (KUBE)	-	2.020.000.000	2,020,000,000		-	-	-	-	2,020,000,000
	JUMLAH	27.988.167.851	70.828.607.308	98.816.775.160	-	26.945.517.033	14.880.802.700	2.132.382.880	43.708.802.513	142,525,477,758



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	URAIAN	BELANJA OPERASI				REALISASI					TOTAL SPJ
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG LAYANAN	Jumlah	%	PERAJAAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JI	Jumlah	%	
1	2	3	4	3+4	5	6	7	8	8+7+6	9	10(1+9)
0	DINAS KESEHATAN	15.300.000.000	15.000.000.000	30.300.000.000	85,24	26.140.000.000	2.800.000.000	2.100.000.000	31.040.000.000	100,00	58.276.852.845,00
-	TAHAP I	4.400.000.000	4.400.000.000	8.800.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	13.100.000.000		18.816.500.000,00
-	TAHAP II	1.100.000.000	-	1.100.000.000		6.000.000.000	700.000.000	20.000.000	6.700.000.000		13.000.000.000,00
-	TAHAP III	-	1.000.000.000	1.000.000.000		75.000.000	270.000.000	-	345.000.000		1.900.000.000,00
2	BUD. Prof. Dr. W. E. J. J. J. J.	16.144.913.234	16.400.000.000	32.544.913.234	91,85	300.000.000	250.000.000	-	550.000.000	100,00	37.447.742.000
-	TAHAP I	1.140.000.000	1.140.000.000	2.280.000.000		100.000.000	100.000.000	-	200.000.000		16.999.400.000
-	TAHAP II	1.000.000.000	-	1.000.000.000		100.000.000	100.000.000	-	200.000.000		18.740.000.000
3	Revisi PP	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
4	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	100.000.000	100.000.000	100,00	-	-	-	-		100.000.000,00
5	Peluang Masyarakat Indonesia (PMI)	-	210.000.000	210.000.000	100,00	-	-	-	-		210.000.000,00
6	Badan Penyelenggaraan Bina Desa Daerah (BPD)	-	410.000.000	410.000.000	100,00	-	-	-	-		410.000.000,00
7	Bina Pemerkasaan	-	540.000.000	540.000.000	100,00	-	-	-	-		540.000.000,00
8	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
9	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
10	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
11	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
12	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
13	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
14	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
15	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
16	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
17	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
18	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
19	Unit Kerja/Instansi & Informasional	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-	-	-		1.000.000.000,00
20	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
21	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
22	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
23	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
24	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
25	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
26	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
27	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
28	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
29	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
30	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
31	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
32	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
33	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
34	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
35	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
36	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
37	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
38	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
39	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
40	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
41	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
42	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
43	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
44	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
45	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
46	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
47	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
48	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
49	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
50	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
51	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
52	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
53	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
54	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
55	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
56	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
57	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
58	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
59	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
60	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
61	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
62	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
63	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
64	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
65	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
66	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
67	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
68	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
69	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
70	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
71	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
72	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
73	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
74	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
75	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
76	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
77	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
78	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
79	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
80	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
81	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
82	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
83	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
84	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
85	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
86	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
87	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
88	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
89	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
90	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
91	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
92	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
93	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
94	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
95	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
96	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
97	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
98	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
99	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
100	DINAS KOTAK	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Jumlah		26.978.000.000	26.978.000.000	53.956.000.000	100,00	26.978.000.000	26.978.000.000	26.978.000.000	53.956.000.000	100,00	107.912.000.000



No	URAIAN	BELANJA OPERASI			SISA ANGGARAN				TOTAL SISA ANGGARAN
		BELANJA PECAHAWAI	BELANJA BARANG JASA	JUMLAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JI	JUMLAH	
1	2	25	26	27 (25+26)	28	29	30	32 (28+29+30+31)	33 (27+32)
2	DINAS KESEHATAN	-	1.364.934.633	1.364.934.633	-	1.590.900,00	-	1.590.900,00	1.366.525.533,00
-	TAHAP I	-	110.898.540	110.898.540	-	-	-	-	110.898.540,00
-	TAHAP II	-	-	-	-	650.000	-	650.000,00	650.000,00
-	TAHAP III	-	1.253.976.113	1.253.976.113	-	940.900	-	940.900,00	1.354.916.613,00
3	RSUD. Prof. DR.W.J. Johannes	1.004.049.765	3.456.639.228	3.460.688.993	62.065.804,00	26.032.308,00	-	88.098.112	3.548.787.105
-	TAHAP I	-	1.271.090.904	1.271.090.904	-	26.032.308	-	26.032.308	1.300.593.012
-	TAHAP II	1.004.049.765	1.385.548.725	2.389.598.489	62.065.804,00	-	-	62.065.804	2.251.664.293
-	SaPhel PP	-	4.600	4.600	-	-	-	-	4.600
4	Dinas Komendasi & Informatika	-	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
5	Palang Merah Indonesia (PMI)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Coid)	-	146.413.881	146.413.881	6.500.000,00	-	-	6.500.000	152.913.881
7	Biro Pemerintahan	-	48.440.500	48.440.500	20.000,00	-	-	20.000	48.460.500
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Sosial (KURB)	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Sosial (KURB)	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
		1.004.049.765	4.246.482.884	5.250.532.649	62.065.804	31.063.008	-	93.128.812	5.343.701.461
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bupat)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bupat)	-	372.571.927	372.571.927	-	-	-	-	372.571.927
11	Badan pendapatan & Aset Daerah	-	49.030.000	49.030.000	-	-	-	-	49.030.000
12	Biro Umum	-	28.200.000	28.200.000	-	-	-	-	28.200.000
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (transisi)	6.250.000	3.255.280	9.505.280	184.518,00	-	-	184.518	9.689.798
20	DINAS SOSIAL	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
		6.250.000	438.057.807	444.307.807	184.518	-	-	184.518	444.492.325
14	Dinas Kepemudaan & Olahraga (Paskibraka)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengembangan Nibek (BPRD)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Kepemudaan & Olahraga (PON PAPUA)	-	812.736.252	812.736.252	-	-	-	-	812.736.252
17	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (Sumber Air)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kepemudaan & Olahraga (Sosis andat PON PAPUA)	-	100.000.450	100.000.450	-	-	-	-	100.000.450
19	Dinas Kepemudaan & Olahraga (Paralimpih PAPUA)	-	500	500	-	-	-	-	500
21	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.005.289.765	5.942.277.973	6.947.567.738	62.250.322	31.063.008	-	93.313.330	6.750.881.068



Berdasarkan data realisasi belanja sebagaimana tabel di atas maka realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari realisasi sesuai SP2D senilai Rp142.525.477.753,00 dipertanggungjawabkan senilai Rp135.775.036.685,00 sisa yang disetor kembali ke kas daerah senilai Rp6.750.441.068,00 dengan rincian tahun 2021 senilai Rp6.690.436.468,00 dan tahun 2022 senilai Rp60.004.600,00. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai berikut:

Tabel g.2.4 Daftar Rincian Realisasi BTT

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
a	Belanja Operasi	92.195.097.422,00
b	Belanja Modal	43.609.939.263,00
Jumlah		135.775.036.685,00

Total Realisasi Belanja Tidak Terduga terdapat alokasi Belanja Modal yang mempengaruhi perolehan Aset Tetap yaitu senilai Rp43.609.939.263,00 yang terdiri dari:

Tabel g.2.5 Daftar Rincian Aset Tetap BTT

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
a	Peralatan dan Mesin	26.877.746.691
b	Gedung dan Bangunan	14.599.809.692
c	Jalan, Jembatan dan Irigasi	2.132.382.880
Jumlah		43.609.939.263

Aset Tetap tersebut tersebar pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Belanja Tidak Terduga (BTT), yaitu:

Tabel g.2.6 Rincian Aset Tetap dari BTT per OPD

No	URAIAN	BELANJA MODAL			JUMLAH
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan dan Irigasi	
1	Dinas Kesehatan	26.141.054.956,00	3.867.211.500,00	2.132.382.880,00	32.140.649.336,00
2	RSUD	596.400.753,00	296.497.492,00		892.898.245,00
3	Satpol PP	27.000.000,00			27.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Covid)	1.500.000,00			1.500.000,00
5	Biro Pemerintahan	13.480.000,00			13.480.000,00
6	Biro Umum		10.116.100.700,00		10.116.100.700,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (transisi)	98.310.982,00			98.310.982,00
8	Dinas Sosial		320.000.000,00		320.000.000,00
Jumlah		26.877.746.691,00	26.877.746.691,00	14.599.809.692,00	2.132.382.880,00

Sehingga, Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) bertambah senilai Rp43.609.000.939.263,00



3. PINJAMAN DAERAH

Dalam rangka mempercepat pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pinjaman dengan para pihak yaitu PT Bank NTT dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan para pihak.

a. PT BANK NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Persetujuan Kredit Nomor: 376/DIR-DPKrKM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Persetujuan Kredit dan Akte Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Kupang tentang Perjanjian Kredit Nomor 43, PT Bank NTT telah mentransfer senilai Rp143.916.722.000,00 atau sesuai besaran kontrak pembangunan infrastruktur daerah yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman PT Bank NTT. Namun sesuai penyelesaian progress proyek maka sisa dana yang ditransfer pada tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp11.509.126.300,00 merupakan SILPA yang kegiatannya dihimpun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Nomor: 911/79/DPA-L/BKUD2/2021 dengan rincian Transfer (SP2D) Paket Pekerjaan (Pinjaman) sebagai berikut:

Tabel 3.a.1 Transfer (SP2D) Paket Pekerjaan (Pinjaman)

NO	PEKERJAAN	NAMA PT/CV	NILAI	SP2D, TANGGAL	KET
1	Peningkatan Jalan Provinsi di Kab. Sumba Timur Melolo – Kananggar	PT SETIA JAYA NIRWANA	3.434.279.750,00	2512/1.01.03.01/SP2D/L S/2021, 26 JULI 2021	Termin VII
2	Peningkatan Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) – Waepana di Kab. Ngada	PT DEWI SRI JAYA	5.051.754.000,00	2210/1.01.03.01/SP2D/L S/2021 7 JULI 2021	Termin VI
3	Peningkatan Jalan Bajawa-Poma di Kabupaten Ngada	PT NUNU RADA MATA	3.023.092.550,00	3797/1.01.03.01/SP2D/L S/2021 10 OKTOBER 2021	Termin III
JUMLAH			11.509.126.300,00		

PENATAUSAHAAN KEUANGAN (Transfer Pinjaman ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 3.a.2 Perhitungan Pengembalian Pinjaman Bank NTT Pokok dan Bunga Tahun 2021

NO	BULAN	BAKI DEBIT	POKOK	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
		143.916.722.000,41			
	Desember 2020	143.916.722.000,41	0,00	1.070.113.277,01	1.070.113.277,01
1	Januari 2021	137.666.722.000,41	6.250.000.000,00	1.325.260.417,00	7.575.260.417,00
2	Februari 2021	131.302.652.902,42	6.250.000.000,00	1.148.437.500,00	7.398.437.500,00
3	Maret 2021	125.927.131.750,36	5.489.590.250,05	1.170.931.877,25	6.660.522.127,30
4	April 2021	119.930.601.667,01	5.996.530.083,35	1.086.768.397,30	7.083.298.480,65
5	Mei 2021	113.934.071.583,66	5.996.530.083,35	1.069.518.105,28	7.066.048.188,63
6	Juni 2021	107.937.541.500,31	5.996.530.083,35	983.266.645,17	6.979.796.728,52
7	Juli 2021	101.941.011.416,96	5.996.530.083,35	962.566.294,75	6.959.096.378,10
8	Agustus 2021	95.944.481.333,61	5.996.530.083,35	909.090.389,49	6.905.620.472,84
9	September 2021	89.947.951.250,26	5.996.530.083,35	828.014.016,99	6.824.544.100,34
10	Oktober 2021	83.951.421.166,91	5.996.530.083,35	802.138.578,96	6.796.668.662,31
11	November 2021	77.954.891.083,56	5.996.530.083,35	724.512.264,87	6.721.042.348,22
12	Desember 2021	71.958.361.000,21	5.996.530.083,35	695.186.768,43	6.691.716.851,78
Jumlah Tahun 2021			71.958.361.000,20	12.775.804.532,50	83.734.165.532,70

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah



Tabel 3.a.3 Pembayaran Pokok/Bunga

NO	URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
		POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			
1	Tagihan Bulan Januari, Surat Nomor 001/DPK/KM/2021, Tanggal 04 Januari 2021						1.070.113.277,01	1.070.113.277,01
2	Tagihan Bulan Januari, Surat Nomor 002/DPK/KM/2021, Tanggal 04 Januari 2021	104/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	27 Januari 2021	105/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	28 Januari 2021	6.250.000.000,00	1.325.260.417,00	7.575.260.417,00
3	Tagihan Bulan Februari Surat Nomor 042/DPK/KM/2021, Tanggal 02 Februari 2021	179/5.02.0.0.00/SP2D/L.S/2021	10 Februari 2021	180/5.02.00.00/SP2D/L.S/2021	10 Februari 2021	6.250.000.000,00	1.148.437.500,00	7.398.437.500,00
4	Tagihan Bulan Maret Surat Nomor 072/DPK/KM/2021, Tanggal 01 Maret 2021	539/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	15 Maret 2021	540/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	15 Maret 2021	5.489.590.250,05	1.170.931.877,25	6.660.522.127,30
5	Tagihan Bulan April Surat Nomor 175/DPK/KM/2021, Tanggal 09 April 2021	793/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	13 April 2021	794/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	13 April 2021	5.996.530.083,35	1.096.768.397,30	7.093.298.490,65
6	Tagihan Bulan Mei Surat Nomor 237/DPK/KM/2021, Tanggal 09 Mei 2021	1160/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	5 Mei 2021	1161/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	5 Mei 2021	5.996.530.083,35	1.096.518.105,26	7.096.048.188,61
7	Tagihan Bulan Juni Surat Nomor 318/DPK/KM/2021, Tanggal 04 Juni 2021	1864/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	14 Juni 2021	1863/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	14 Juni 2021	5.996.530.083,35	983.298.645,17	6.979.796.728,52
8	Tagihan Bulan Juli Surat Nomor 366/DPK/KM/2021, Tanggal 02 Juli 2021	2198/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	6 Juli 2021	2197/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	6 Juli 2021	5.996.530.083,35	962.598.294,75	6.959.096.378,10
9	Tagihan Bulan Agustus Surat Nomor 390/DPK/KM/2021, Tanggal 02 Agustus 2021	2690/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	5 agustus 2021	2689/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	5 agustus 2021	5.996.530.083,35	909.090.389,49	6.905.620.472,84
10	Tagihan Bulan September Surat Nomor 416/DPK/KM/2021, Tanggal 02 September 2021	3153/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	6 September 2021	3167/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	6 September 2021	5.996.530.083,35	828.014.016,99	6.824.544.100,34
11	Tagihan Bulan Oktober Surat Nemer 517/DPK/KM/2021, Tanggal 04 Oktober 2021	3634/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	11 Oktober 2021	3635/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	11 Oktober 2021	5.996.530.083,35	802.136.576,96	6.788.668.662,31
12	Tagihan Bulan November Surat Nomor 637/DPK/KM/2021, Tanggal 02 November 2021	4078/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	9 November 2021	4077/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	9 November 2021	5.996.530.083,35	724.512.264,87	6.721.042.348,22
13	Tagihan Bulan Desember Surat Nomor 664/DPK/KM/2021, Tanggal 02 Desember 2021	4633/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	3 Desember 2021	4634/5.02.0.00/SP2D/L.S/2021	3 Desember 2021	5.996.530.083,35	695.188.768,43	6.691.716.851,78
TOTAL						71.858.361.009,20	12.775.804.532,50	84.734.165.532,70

b. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

Fasilitasi Pembiayaan Pinjaman Daerah ditujukan untuk membiayai Pembangunan Infrastruktur (Proyek) dengan jangka waktu pengembalian fasilitas selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan I



(pertama). Pembangunan Infrastruktur dimaksud yakni senilai 7 Ruas dan 9 Ruas jalan sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Daerah.

1) Tahap Pertama (Reguler) 7 Ruas Jalan

Dari total pinjaman tahap I senilai Rp66.684.000.000,00 pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp62.723.257.000,00 atau 95,63% dari nilai kontrak senilai Rp65.592.897.000,00. Hal ini dikarenakan ada pekerjaan yang tidak selesai atau di berhentikan (PHK) yakni Peningkatan Jalan Kondo - Noa - Hita Kab. Manggarai Barat sehingga sisa pembayaran tidak dapat dilanjutkan lagi. Transfer Pinjaman senilai Rp62.723.257.000,00 untuk membiayai 7 Ruas Jalan antara lain:

Tabel 3.b.1 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 7 Ruas Jalan

NO	URAIAN	PELAKSANA	SP2D		JUMLAH
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Peningkatan Jalan Oenlasi - Anin - SP. Sunu - Boking Kab. TTS				
	Uang Muka	PT NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	401/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	1.735.428.000
	Termin 1		1959/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	8.711.853.600
	Termin 2		4063/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	1.122.238.400
	JUMLAH				11.569.520.000
2.	Peningkatan Jalan Waewerang - Sagu Kab. Flores Timur				
	Uang Muka	PT CITRA MANDIRI KONSTRUKSI	419/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	687.900.000
	Termin 1		1966/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	2.547.008.000
	Termin 2		4064/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	1.351.092.000
	JUMLAH				4.586.000.000
3.	Peningkatan Jalan Kondo - Noa - Hita Kab. Manggarai Barat				
	Uang Muka	PT INEKE SEJATI UTAMA	420/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	728.675.000
	Termin 1		1968/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	828.047.200
	Termin 2		4093/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	420.137.800
	JUMLAH				1.974.860.000
4.	Peningkatan Jalan Kokar - Tulta - Mali Kab. Alor				
	Uang Muka	PT KARYA BARU CALISA	421/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	1.755.000.000
	Termin 1		1962/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	3.758.464.000
	Termin 2		4066/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	6.186.536.000
	JUMLAH				11.700.000.000
5.	Peningkatan Jalan Watabuku (SP.Mola) - Mataraben Kab. Alor				
	Uang Muka	PT KARYA BARU CALISA	422/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	1.155.552.150
	Termin 1		1983/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	2.188.976.000
	Termin 2		4065/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	4.359.152.850
	JUMLAH				7.703.681.000
6.	Peningkatan Jalan Beangonong - Boloang Kab. Alor				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	432/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	2.330.604.400
	Termin 1		1973/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	6.788.592.000
	Termin 2		4067/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	4.692.572.800
	Termin 3		4689/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	06 Desember 2021	1.725.728.800
	JUMLAH				15.538.696.000



NO	URAIAN	PELAKSANA	SP2D		JUMLAH
			NOMOR	TANGGAL	
7.	Peningkatan Jalan Beranusa - Puntaru Kab. Alor				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	433/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	04 Maret 2021	1.447.575.000
	Termin 1		19/2/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	5.291.541.200
	Termin 2		4068/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	08 November 2021	2.911.277.800
	JUMLAH				9.650.500.000
TOTAL 7 RUAS					62.723.257.000

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

1. Penatausahaan Keuangan

- Transfer Pinjaman ke Bendahara Umum Daerah (BUD)
Penerimaan pinjaman yang bersumber dari SMI Tahap I ditransfer ke RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.b.1.1 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman dari PT SMI Tahap I

NO	TANGGAL	REKENING	JUMLAH
1	4 Maret 2021	00101020010187/1013548863	9.838.934.550
2	22 Juni 2021	00101020010187/1013548863	30.115.588.000
3	9 November 2021	00101020010187/1013548863	21.457.862.650
4	6 Desember 2021	00101020010187/1013548863	1.725.726.800
TOTAL			63.138.112.000

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Terhadap selisih antara jumlah yang ditransfer ke RKUD dan pembayaran ke penyedia/pelaksana pekerjaan adalah senilai Rp414.855.00.00 merupakan Pengembalian Jaminan Uang Muka pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kondo - Noa - Hita Kab. Manggarai Barat. Uang tersebut masih di kas daerah yang harus dikembalikan ke PT SMI dan akan diselesaikan pada tahun 2022

- Pembayaran Pokok/Bunga

Tabel 3.b.1.2 Daftar Rincian Pembayaran Pokok/Bunga

NO	URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
		POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			
1	Tagihan Bulan Mei S-420/SM/DP/0521, Tanggal 4 Mei 2021			1412/5.02.0.0.0/SP2D/LS/2021	19 Mei 2021	-	120.679.996	120.679.996
2	Tagihan Bulan Agustus S-95/SM/DP/DPPU/0821, Tanggal 9 Agustus 2021			2918/5.02.0.0.0/SP2D/LS/2021	24 Agustus 2021	-	423.042.735	423.042.735
3	Tagihan Bulan November S-205/SM/DP/DPPU/1121, Tanggal 15 November 2021			4266/5.02.0.0.0/SP2D/LS/2021	19 November 2021	-	597.110.850	597.110.850
4	Tagihan Bulan November S-205/SM/DP/DPPU/1121, Tanggal 15 November 2021	4275/5.02.0.00/SP2D/LS/2021	19 November 2021			15.353.096.301	-	15.353.096.301
Jumlah						15.353.096.301	1.140.833.583	16.493.929.884

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah



2) Tahap Kedua (Reguler) 9 Ruas Jalan

Total Pinjaman Deerah tahap II senilai Rp123.092.240.000,00 pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp117.317.833.650,00 atau 97,92% dari nilai kontrak senilai Rp119.814.247.000,00. Hal ini dikarenakan ada pekerjaan yang tidak selesai atau di berhentikan (PHK) yakni Peningkatan Jalan Kapan - Nenas kab. TTU sehingga sisa pembayaran tidak dapat dilanjutkan lagi. Transfer Pinjaman senilai Rp117.317.833.650,00 untuk membiayai 9 Ruas Jalan antara lain:

Tabel 3.b.2.1 Daftar Rincian Pembayaran Tahap II untuk 9 Ruas Jalan

NO	URAIAN	PELAKSANA	SP2D		JUMLAH
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Peningkatan Jalan Kananggar-Ngongi (SP Aukakehok) Kab. Sumba Timur				
	Uang Muka	PT ADISTI INDAH	402/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	2.151.205.050
	Termin 1		1971/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	4.977.592.000
	Termin 2		4170/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	7.212.569.950
	JUMLAH				14.341.367.000
2.	Peningkatan Jalan Ekam (Nonbes Bauri) Kab. Kupang				
	Uang Muka	PT USAHA KARYA BUANA	399/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	1.393.605.000
	Termin 1		1958/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	4.859.520.000
	Termin 2		4165/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	3.237.575.000
JUMLAH				9.290.700.000	
3.	Peningkatan Jalan Malahar - SP, Tarimbang Praipaha Kab. Sumba Timur				
	Uang Muka	PT SETIA JAYA NIRWANA	400/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	600.000.000
	Termin 1		1960/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	975.572.000
	Termin 2		4167/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	2.424.428.000
	JUMLAH				4.000.000.000
4.	Peningkatan Jalan Nenas - Sutual Kab. TTS				
	Uang Muka	PT PUTERA Cipta KREASI PRATAMA	398/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	1.634.546.850
	Termin 1		1967/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	3.136.820.000
	Termin 2		4168/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	3.709.969.500
	Termin 3		4685/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	6 Desember 2021	2.415.642.550
	JUMLAH				10.896.979.000
5.	Peningkatan Jalan Baing - Aukakehok Kab. Sumba Timur				
	Uang Muka	PT HERTO PERSADA SAKTI	418/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	2.279.839.800
	Termin 1		1954/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	4.835.232.800
	Termin 2		4169/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	5.747.073.600
	Termin 3		4686/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	6 Desember 2021	2.338.785.800
	JUMLAH				15.198.932.000
6.	Peningkatan Jalan Pota - Waiklambu (BTS) Kab. Manggarai Timur				
	Uang Muka	PT BINA CITRA TEKNIK CAHAYA	417/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	997.500.000
	Termin 1		1970/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	2.882.626.400
	Termin 2			15 November 2021	-
	Termin 3			7 Desember 2021	2.769.873.500
	JUMLAH				6.649.999.900
7.	Peningkatan Jalan Hansisi - Tanjung Meolao Kab. Kupang				



NO	URAIAN	PELAKSANA	SP2D		JUMLAH
			NOMOR	TANGGAL	
	Uang Muka	PT NUSA JAYA ABADI	416/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	4.066.690.350
	Termin 1		1965/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	4.354.671.200
	Termin 2		4166/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	18.689.907.450
	JUMLAH		27.111.269.000		
	8.	Peningkatan Jalan Kapan - Nenas kab. TTU			
	Uang Muka	PT SARI KARYA MANDIRI	431/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	2.158.500.000
	Termin 1		1961/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	1.752.356.800
	Termin 2		4171/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	6.369.763.200
	Termin 3			7 Desember 2021	1.612.966.750
	JUMLAH				11.893.586.750
9.	Peningkatan Jalan Ngonggi - Wahang - Malohar Kab. Sumba Timur				
	Uang Muka	PT ARAYA FLOBAMORA PERKASA	430/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	4 Maret 2021	2.690.250.000
	Termin 1		1969/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	21 Juni 2021	6.838.281.600
	Termin 2		4164/1.01.03.01/SP2D/LS/2021	15 November 2021	8.406.468.400
	JUMLAH				17.935.000.000
TOTAL 9 RUAS					117.317.833.650

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

1. Penatausahaan Keuangan

- Transfer Pinjaman ke Bendahara Umum Daerah (BUD)

Penerimaan pinjaman yang bersumber dari SMI Tahap II ditransfer ke RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.b.2.1.1 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman dari PT SMI Tahap II

NO	TANGGAL	REKENING	JUMLAH
1	4 Maret 2021	00101020010187/1013548863	17.972.137.050,00
2	22 Juni 2021	00101020010187/1013548863	34.412.672.800,00
3	15 November 2021	00101020010187/1013548863	55.797.755.200,00
4	6 Desember 2021	00101020010187/1013548863	9.135.268.600,00
TOTAL			117.317.833.650,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

- Pembayaran Pokok/Bunga

Tabel 3.b.2.1.2 Daftar Rincian Pembayaran Pokok/Bunga

NO	URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
		POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL			
1	Tagihan Bulan Mei S-420/SMI/DU/0521,Tanggal 4 Mei 2021			1413/5.0 2.0.00.0/ SP2D/LS/ 2021,	19 Mei 2021	-	220.438.245	220.438.245
2	Tagihan Bulan Agustus S-95/SMI/DPI/DP U/0821,Tanggal 9 Agustus 2021			2917/5.0 2.0.00/SP 2D/LS/20 21	24 Agustu s 2021	-	574.894.028	574.894.028
3	Tagihan Bulan November S-205/SMI/DPI/DP			4265/5.0 2.0.00/SP 2D/LS/20	19 Novem ber	-	619.394.280	619.394.280



NO	URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
		POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL			
	PU/1121,Tangga 1 15 November 2021			21	2021			
4	Tagihan Bulan November S- 205/SM/DP/DP PU/1121,Tangga 1 15 November 2021	4274/5.0 2.0.00/SP 2D/LS/20 21	19 Nove mber 2021			27.045.641.263	-	27.045.641.263
Jumlah						27.045.641.263	1.614.726.553	28.660.367.816

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

a. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

1) Dasar Hukum

a) Permohonan Pemerintah Provinsi NTT

Nomor: 900/1138/BKUD1/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

b) Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan

Nomor: S-666/SMI/DU/0721 perihal Surat Penawaran Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ('PT SMI') kepada Pemprov. NTT

c) Perjanjian Pinjaman Pembiayaan

Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021

2) Tujuan Pinjaman

a) Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan

b) Kegiatan non-fisik (non-infrastruktur) yaitu biaya pengurusan izin-izin tidak dibiayai dengan Pinjaman dalam Perjanjian ini

3) Jumlah Fasilitas Pinjaman (Pasal 3)

a) Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian, PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah setinggi-tingginya senilai Rp1.003.113.760.000 (satu triliun tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

b) Sifat Pinjaman adalah aflopend atau non-revolving di mana kelonggaran tarik yang timbul akibat pembayaran/pelunasan Hutang pokok tidak dapat ditarik atau tidak dapat digunakan kembali.

4) Jangka Waktu Pinjaman (Pasal 4)

a) Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 8 (delapan) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali ("jangka waktu pinjaman") termasuk masa tenggang/ pembayaran pokok Pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan ("Masa Tenggang")

b) Masa Tenggang dimulai sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali



- c) Pencairan Pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal efektifnya Perjanjian ini dan terpenuhinya persyaratan pencairan
 - d) Masa Pencairan Pinjaman (atau "*Availability Period*") adalah sejak tanggal pencairan pertama Pinjaman sampai dengan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022
 - e) Apabila sampai dengan berakhirnya *Availability Period* masih terdapat porsi Pinjaman yang belum dicairkan, maka PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pencairan atas sisa porsi Pinjaman yang belum dicairkan tersebut
 - f) Apabila jangka waktu Pinjaman telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tetap harus memenuhi seluruh hutang dan kewajiban kepada PIHAK PERTAMA
- 5) Bunga dan Fasilitas Pinjaman (Pasal 5)
- a) Atas setiap Pinjaman berdasarkan Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib membayar bunga senilai 6,19 % (enam koma Sembilan belas persen) p.a. di mana bunga Fasilitas Pembiayaan dihitung dari Fasilitas Pembiayaan yang ditarik oleh PIHAK KEDUA.
 - b) Bunga dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut PMK Pinjaman PEN Daerah. PIHAK KEDUA dengan ini setuju dan karenanya tunduk pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan DJPK.
 - c) Pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan dan dikenakan setiap bulan
 - d) Periode perhitungan Bunga dilakukan secara bulanan (selanjutnya disebut "*Periode Perhitungan Bunga*"), yang akan dihitung sebagai berikut:
 - (1) Periode Perhitungan Bunga untuk masing-masing penarikan Fasilitas Pembiayaan akan dimulai pada tanggal penarikan Fasilitas Pembiayaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga dengan memperhitungkan jumlah kalender pada masing-masing bulan di mana penarikan Fasilitas Pembiayaan dilakukan.
 - (2) Periode Perhitungan Bunga berikutnya akan dimulai pada Tanggal Pembayaran Bunga sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.
 - (3) Periode Perhitungan Bunga terakhir akan dimulai sejak Tanggal Pembayaran Bunga sebelumnya dan akan berakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo Fasilitas Pembiayaan.
 - (4) Pada masa *Availability Period* dan dalam hal terdapat penarikan Pinjaman di mana PIHAK PERTAMA telah menyampaikan permohonan dan melaksanakan perhitungan DTU, maka kewajiban pembayaran pokok dan/atau Bunga akan diperhitungkan pada periode pembayaran Pokok dan/atau Bunga berikutnya.



- e) Perhitungan Bunga dihitung secara harian (termasuk hari libur) berdasarkan ketentuan bahwa pembagi tetap jumlah dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA
- f) Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari libur, maka pembayaran Bunga akan dibayarkan 1 (satu) Hari Kerja sebelum hari libur tersebut.
- g) PIHAK KEDUA wajib membayar Biaya Pinjaman sebagai berikut:
- (1) Biaya pengelolaan Pinjaman senilai 0,185 % (nol koma satu delapan lima persen) per tahun sebagai berikut:
- (a) Untuk pertama kalinya senilai 0,185 % (nol koma satu delapan lima persen) dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya Perjanjian, dan;
- (b) Untuk tahun-tahun berikutnya senilai 0,185 % (nol koma satu delapan lima persen) per tahun dari jumlah baki debet/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun Perjanjian yang berkenaan.
- (2) Biaya Provisi senilai 1% (satu persen) dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan 1 kali yang dibayarkan 1 kali pencairan Tahap III Pinjaman atau selambat-lambatnya sebelum tanggal terakhir sebelum tanggal terakhir masa Pencairan Pinjaman III Pinjaman atau selambat-lambatnya sebelum tanggal terakhir sebelum tanggal terakhir masa Pencairan Pinjaman
- h) Pembayaran biaya-biaya dilakukan dengan melakukan penyetoran ke Rekening PIHAK PERTAMA
- i) Biaya-biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- 6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek/kegiatan yang dibiayai SMI-PEN antara lain:
- a) Penanganan Jalan di Wilayah Kota Kupang
- | | |
|--|------------------|
| (1) Penanganan Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. CS | Rp25.500.000.000 |
| (2) Penanganan Ruas Jln. H. R. Koroh | Rp4.080.000.000 |
| (3) Penanganan Ruas Jln. Amabi | Rp4.080.000.000 |
- b) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Kupang
- | | |
|---|------------------|
| (1) Penanganan Jalan Ruas Hansisi - Tanjung Meolao | Rp22.950.000.000 |
| (2) Penanganan Jalan Ruas Oesao - Buraen | Rp11.761.875.000 |
| (3) Penanganan Jalan Ruas Oemoro - Oekabiti | Rp38.687.500.000 |
| (4) Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang -
Tabiolong | Rp8.032.500.000 |



(5) Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang – Baun	Rp5.259.375.000
(6) Penanganan Jalan Ruas Oelmasi - Kukak – Barate	Rp5.355.000.000
(7) Penanganan Jalan Ruas Naikliu - Oepoli (Bts Negara)	Rp3.729.375.000
c) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Timor Tengah Selatan (TTS)	
(1) Penanganan Jalan Ruas Kapan - Bts. Kab. TTU	Rp21.037.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Sp. Niki-niki – Oenlasi	Rp5.928.750.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Oenlasi - Anin - Sp. Sunu – Boking	Rp27.936.875.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Panite – Oemoro	Rp5.737.500.000
(5) Penanganan Jalan Ruas Nenas – Sutual	Rp22.950.000.000
(6) Penanganan Jalan Ruas Jalan Gunung Mollo (Soe)	Rp4.398.750.000
(7) Penanganan Jalan Ruas Batu Putih – Panite	Rp3.825.000.000
(8) Penanganan Jalan Ruas Panite – Kolbano	Rp4.525.187.500
d) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Timor Tengah Utara (TTU)	
(1) Penanganan Jalan Ruas Kefamenanu – Eban	Rp1.912.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Maubesi – Wini	Rp1.912.500.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	Rp3.825.000.000
e) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Belu	
(1) Penanganan Jalan Ruas Halilulik - Bts. Kab. Malaka	Rp5.737.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Atambua – Weluli	Rp7.650.000.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	Rp3.825.000.000
f) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Malaka	
(1) Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Belu - Sanleo – Sp. Welaus	Rp14.343.750.000
g) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Rote Ndao	
(1) Penanganan Jalan Ruas Ba'a – Batutua	Rp5.737.500.000
h) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Alor	
(1) Penanganan Jalan Ruas Beangonong – Boloang	Rp4.264.875.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Kalabahi – Kokar	Rp28.515.375.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Kokar - Tulta – Mali	Rp25.899.385.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben	Rp35.878.500.000



(5) Penanganan Jalan Ruas Baranusa – Puntaru	Rp2.878.312.500
i) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sabu Raijua	
(1) Penanganan Jalan Ruas Seba – Ege	Rp15.491.250.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Ledena Teriu	Rp10.518.750.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Ledemanu – Lobodei	Rp4.609.125.000
j) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Lembata	
(1) Penanganan Jalan Ruas Waijarang – Wulandoni	Rp26.212.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Balauring – Wairiang	Rp10.730.625.000
k) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Flores Timur	
(1) Penanganan Jalan Ruas Ritaebang – Podor – Lamakera	Rp34.807.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Wailebe – Baniona – Waiwerang	Rp9.562.500.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Mudajebak (Bts. Kab) – Lato – Wairunu	Rp18.646.875.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Watowiti – Waiklibang	Rp1.912.500.000
(5) Penanganan Jalan Ruas Waiwerang – Sagu	Rp5.374.125.000
l) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sikka	
(1) Penanganan Jalan Ruas Waepare – Bola	Rp9.562.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Napung – Mali – Mudajebak (Bts. Kab)	Rp13.387.500.000
m) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Ende	
(1) Penanganan Jalan Ruas Detusoko – Maurole	Rp20.846.250.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Kaburea (Bts. Kab) – Maukaro – Nabe	Rp15.797.250.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Wologai – Detukeli	Rp7.669.125.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Ende – Nuabosi	Rp1.912.500.000
(5) Penanganan Jalan Ruas Nabe – Ranakolo	Rp2.811.375.000
(6) Penanganan Jalan Ruas Maurole – Kotabaru – Koro (Bts. Kab) Sikka	Rp7.707.375.000
n) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Ngada	
(1) Penanganan Jalan Ruas Poma – Mboras (Riung)	Rp17.901.000.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Mbazang (Bts. Kab./Manggarai – Waepana	Rp15.510.375.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Mboras (Riung) – Danga	Rp14.821.875.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Bajawa – Poma	Rp13.005.000.000



(5) Penanganan Jalan Ruas Waiklambu (Bts. Kab)	
Riung – Mboras	Rp5.967.000.000
(6) Penanganan Jalan Ruas Malanusa – Maumbawa	Rp7.267.500.000
o) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Nagekeo	
(1) Penanganan Jalan Ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)	Rp13.272.750.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Gako – Mauponggo	Rp3.060.000.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Mauponggo – Maumbawa	Rp3.442.500.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Marapokat – Aeramo	Rp2.295.000.000
p) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Manggarai Timur	
(1) Penanganan Jalan Ruas Bealning - Mukun – Mbazang (Bts. Kab)	Rp9.562.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Reo - Dampak – Pota	Rp18.073.125.000
q) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Manggarai	
(1) Penanganan Jalan Ruas Sp. Cumbi - Golo Cala – Iteng	Rp22.185.000.000
r) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Manggarai Barat	
(1) Penanganan Jalan Ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts Kab)	Rp3.825.000.000
s) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sumba Timur	
(1) Penanganan Jalan Ruas Nggongi - Wahang – Malahar	Rp38.542.500.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Malahar - Sp. Tarimbang – Praipaha	Rp19.192.500.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Baing – Aukakehok	Rp28.142.500.000
(4) Penanganan Jalan Ruas Sp. Mohubukul – Lumbung	Rp3.060.000.000
(5) Penanganan Jalan Ruas Melolo – Kananggar	Rp4.437.000.000
(6) Penanganan Jalan Ruas Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)	Rp1.912.500.000
t) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sumba Tengah	
(1) Penanganan Jalan Ruas Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat	Rp12.718.125.000
u) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sumba Barat	
(1) Penanganan Jalan Ruas Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya	Rp10.270.125.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Waikabubak – Bts. Kab. Sumba Tengah	Rp13.291.875.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Padedewatu	
(Sp. Nihi Watu) – Patiala	Rp4.207.500.000



(4) Penanganan Jalan Ruas Padedeweri – Wanokaka	Rp3.060.000.000
v) Penanganan Jalan di Wilayah Kab. Sumba Barat Daya	
(1) Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Sumba Barat – Gaura – Bondokodi	Rp10.863.000.000
(2) Penanganan Jalan Ruas Waitabula – Bondokodi	Rp3.060.000.000
(3) Penanganan Jalan Ruas Radamata – Ketewer	Rp9.562.500.000
a) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende	
(1) Embung Ndewe Tugu Nio (Ds. Kamubheka Kec. Maukoro)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Lowo Nunu (Ds. Kuru Kec. Lampebu Kelisoke)	Rp1.570.000.000
b) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Kupang	
(1) Embung Suin(Ds. Uiasa Dusun III Kec. Semau)	Rp1.570.000.000
(2) Embung oeanak (Ds. Eoanek Kec. Kupang Barat)	Rp1.570.000.000
c) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Nagekeo	
(1) Embung Padang (Ds. Dhereisa Kec. Boawae)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Dona (Ds. Kotakeo 1 Kec. Boawae)	Rp1.570.000.000
d) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao	
(1) Embung lu Oen (Ds. Lakamola Kec. Rote Timur)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Nita Kopas (Ds. Godi Meda Kec. Rote Tengah)	Rp1.570.000.000
e) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sabu Raijua	
(1) Embung Erapuru (Ds. Raiboro Dusun 2 Kec. Sabu Laie)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Wadu Pala (Ds. Ledeke Kec. Sabu Liae)	Rp1.570.000.000
f) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumba Tengah	
(1) Embung Kadapurara (Ds. Wailawa Dusun 1 Kec. Katiku Tana Selatan)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Laidawungong (Ds. Dameka Kec. Katiku Tana Selatan)	Rp1.570.000.000
g) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTU	
(1) Embung Fatukfun (Ds. Kotafoin Dusun 1 Kec. Biboki Anleu)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Oetfo (Ds. Ponu Kec. Biboki Anleu)	Rp1.570.000.000
h) Pembangunan Embung Kecil di Kota Kupang	
(1) Embung Naik Lini (Kel. Naioni Kec. Alak)	Rp1.570.000.000
(2) Embung Penkase (Ds.Oeleta Kec. Alak)	Rp1.570.000.000



- i) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Malaka
 - (1) Embung Pelita (Ds. Lakekun Uturuan 1 Kec. Kobalima) Rp1.570.000.000
 - (2) Embung Fohomonas (Ds. Barada Kec. Malak Tengah) Rp1.570.000.000
 - (3) Embung Uimpami (Ds. Kufeu Kec. Io Kufeu) Rp1.570.000.000
- j) Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS
 - (1) Embung Oemali (Ds. Linamutu Kec. Amanuban Selatan) Rp1.570.000.000
 - (2) Embung Besipae 1 (Ds. Linamutu Kec. Amanuban Selatan) Rp1.570.000.000
 - (3) Embung Besipae 2 (Ds. Linamutu Kec. Amanuban Selatan) Rp1.570.000.000
- a) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah,
Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Desa Padiratana Rp4.400.000.000
- b) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat,
Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoku Rp3.000.000.000
- c) Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur
Kecamatan Kanatang, Puru Kampera Rp8.600.000.000
- d) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur,
Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu Rp2.800.000.000
- e) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba
Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade Rp2.700.000.000
- f) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya,
Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira Rp4.700.000.000
- g) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU,
Kecamatan Noemuti, Desa Banfanu Rp2.100.000.000
- h) Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di
Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur Rp6.200.000.000
- i) Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum
Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mahara,
Desa Lobohe Rp1.800.000.000
- j) Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum
Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa, Kelurahan Dhawe Rp2.456.000.000
- k) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten
Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Riwu Rp2.350.000.000
- l) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU,



- | | |
|---|------------------|
| Kecamatan Insana, Desa Ainut | Rp 1.800.000.000 |
| m) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, | |
| Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Nunleu | Rp2.900.000.000 |
| n) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao, | |
| Kecamatan Landeleko, Desa Bolatena | Rp1.400.000.000 |
| o) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua, | |
| Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimonearu | Rp1.650.000.000 |
| p) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, | |
| Kecamatan Maurole, Desa Maurole | Rp2.300.000.000 |
| q) Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten | |
| Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Radja | Rp1.600.000.000 |
| r) Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit | |
| (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kota Kupang, | |
| Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka | Rp 800.000.000 |
| s) Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit | |
| (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kabupaten | |
| Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan | |
| Kabupaten Manggarai Barat | Rp8.800.000.000 |
- Transfer Pinjaman ke Bendahara Umum Daerah (BUD)
- Penerimaan pinjaman yang bersumber dari SMI - PEN ditransfer ke RKUD senilai uang muka pekerjaan yakni 25% dari nilai kontrak.

Tabel 3.c.1 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman berupa Uang Muka

NO	TANGGAL	REKENING	JUMLAH
1.	17 Desember 2021	00101020010187/1013548863	250.778.440.000
TOTAL			250.778.440.000

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

- Pembayaran Pokok/Bunga

Tabel 3.c.2 Daftar Rincian Pembayaran Pokok/Bunga

NO	URAIAN	SP2D		KEWAJIBAN	JUMLAH
		NOMOR	TANGGAL		
1	Tagihan Bulan Oktober S-810/SMI/DU/1021, 4 Oktober 2021	3760/5.02.00.00/S P2D/LS/2021	21 Oktober 2021	378.325.000	378.325.000
2	Tagihan Bulan Oktober S-810/SMI/DU/1021, 4 Oktober 2021	3795/5.02.00.00/S P2D/LS/2021	25 Oktober 2021	1.477.435.456	1.477.435.456
3	Tagihan Bulan Oktober S-169/SMI/DPI/DPPU/1021, 27 Oktober 2021	3833/5.02.00.00/S P2D/LS/2021	28 Oktober 2021	13.967.862	13.967.862



NO	URAIAN	SP2D		KEWAJIBAN	JUMLAH
4	Tagihan Bulan November S-201/SM/DPI/DPPU/1121, 25 November 2021	4360/5.02.00.00/S P2D/LS/2021	26 November 2021	17.257.258	17.257.258
5	Tagihan Bulan November S-201/SM/DPI/DPPU/1121, 25 November 2021	4361/5.02.00.00/S P2D/LS/2021	26 November 2021	65.348.177	65.348.177
TOTAL				1.962.333.753	1.962.333.753

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Terkait pembayaran bunga dan administrasi lainnya yang secara proporsional termasuk dalam biaya kapitalisasi belum dapat diatribusikan ke dalam aset tetap yang ditimbulkan karena adanya pinjaman dari PT SMI-PEN karena pembayaran bunga masih terus berjalan sampai dengan tahun anggaran 2029 dan sampai dengan tanggal pelaporan kontrak terhadap nilai pinjaman senilai Rp1.003.113.760.000 (satu triliun tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) belum dilakukan secara penuh.

4. SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan telah terjadi bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 2 April sampai dengan 5 April 2021 yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerugian harta benda, rusaknya permukiman masyarakat, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta lahan produksi pertanian sehingga mengancam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja di Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTT menerima Sumbangan Masyarakat baik Perorangan, Kelompok, Organisasi maupun Pemerintah Daerah Lainnya dalam bentuk uang. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tanggap Darurat maka uang hasil sumbangan masyarakat/pihak ketiga tidak disetor ke Kas Daerah sehingga tidak mengikuti mekanisme APBD. Namun tetap disahkan menjadi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja. Penggunaan Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja senilai Rp10.808.734.261,00 mengacu pada ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900/251/BKUD4/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT Nomor: BPBD.360/KEPUM/188/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 hal Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Sumbangan Masyarakat Para Pihak Siklon Tropis Seroja Tahun 2021. Pengakuan realisasi pendapatan sumbangan masyarakat/pihak ketiga oleh Provinsi NTT dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) oleh BUD, setelah menerima total dana sumbangan dari PT Bank NTT.



Total Realisasi Pendapatan sesuai SP2H yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD senilai RpRp10.808.734.261,00. Dari total realisasi pendapatan, berdasarkan penetapan SP2H sebagaimana di atas, dijabarkan untuk Belanja barang hibah yang akan diserahkan kepada masyarakat. Pengakuan realisasi belanja sumbangan masyarakat/pihak ketiga oleh Provinsi NTT dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT. Penggunaan uang hasil sumbangan masyarakat/pihak ketiga mengacu pada Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900/251/BKUD4/2021 dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Sumbangan Masyarakat/Pihak ke III per Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kota Kupang	3.480.593.600
2	Kab. Kupang	414.100.500
3	TTS	111.875.500
4	TTU	282.700.000
5	Belu	373.890.000
6	Malaka	423.189.250
7	Alor	487.751.000
8	Lembata	745.108.100
9	Flotim	441.084.800
10	Sikka	294.112.500
11	Ende	477.730.000
12	Negekeo	584.512.500
13	Ngada	104.725.500
14	Manggarai Timur	27.588.000
15	Manggarai Barat	189.123.000
16	Sumba Barat	35.376.000
17	Sumba Timur	1.488.025.000
18	Sebu Raijua	322.051.400
19	Rote Ndao	525.096.000
Total Jumlah		10.808.612.650

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Realisasi sumbangan masyarakat dalam rangka Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja, dengan total belanja berdasarkan SPB adalah senilai Rp10.808.612.650,00 sedangkan sisa sumbangan masyarakat/pihak ketiga senilai Rp121.611,00 disetor kembali ke Kas Daerah.

5. ASET TETAP TANPA RINCIAN PADA NERACA PEMERINTAH DAERAH

Neraca Pemerintah Provinsi NTT dari tahun buku 2012 mencatat nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.147.229.557,80 pada bangunan lainnya dan Aset Tetap Peralatan dan mesin senilai Rp7.639.804.708,00 namun tidak diketahui keberadaan, jumlah, kondisi dan harga satuannya. Asset tersebut tercatat pada 2 (dua) SKPD yakni pada Gedung dan Bangunan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Aset Peralatan dan Mesin pada Biro Umum



Setda Prov. NTT. Hal ini dilakukan dalam rangka penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Buku 2012 namun berdasarkan hasil penelusuran dokumen-dokumen historis antara lain: dokumen hasil Appraisal Aset tahun 2005, LKPD tahun-tahun sebelumnya dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa tidak dapat membuktikan keberadaan asset tetap tersebut. Terhadap selisih pencatatan asset tetap tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2021 telah mengambil Langkah untuk dapat menghapusnya dari Neraca Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi asset tersebut pada KIB C pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan KIB B pada Biro Umum Setda. Prov. NTT untuk selanjutnya dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.





1) Sekolah Menengah Atas (Negeri)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					Selisih Anggaran dan SP2T	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Anggaran	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = (4-9)	11	12 = (4-11)	13
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	312.418.244.238,00	8.252.919.415,00	309.333.883.000,00	1.150.000.000,00	1.750.000.000,00	320.486.802.415,00	(8.067.558.176,00)	318.868.181.359,00	(6.448.937.123,00)	
I.	02.1.01.53.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas										
1	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	54.812.025.035,00	-	-	-	-	-	54.812.025.035,00	57.785.216.836,00	(2.973.191.601,00)	-
		- SILPA '20						-	-	452.542.000,00	(452.542.000,00)	
		- BOS '21	54.812.025.035,00					-	54.812.025.035,00	57.332.674.036,00	(2.520.648.601,00)	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.195.186.651,00	8.252.919.415,00	216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	227.664.463.415,00	(103.489.296.764,00)	122.100.513.545,00	2.094.653.106,00	-
		- SILPA '20	8.252.919.415,00	8.252.919.415,00				8.252.919.415,00	-	2.647.809.697,00	6.605.049.718,00	
		- BOS '21	115.942.247.236,00		216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	219.431.544.000,00	(103.489.296.764,00)	119.452.543.848,00	(3.610.398.612,00)	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	41.845.029.272,00	-	-	-	-	-	41.845.029.272,00	44.000.386.088,00	(2.155.356.816,00)	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.845.029.272,00	-	-	-	-	-	41.845.029.272,00	24.602.767.872,00	17.042.321.400,00	-
		- SILPA '20						-	-	2.279.235.260,00	(2.279.235.260,00)	
		- BOS '21	41.845.029.272,00					-	41.845.029.272,00	22.523.472.612,00	19.321.556.660,00	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-	-	19.197.678.216,00	(19.197.678.216,00)	-
		- SILPA '20						-	-	170.385.540,00	(170.385.540,00)	
		- BOS '21	-					-	-	19.027.292.276,00	(19.027.292.276,00)	
			220.852.220.958,00	8.252.919.415,00	216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	227.664.463.415,00	(8.832.242.457,00)	223.866.115.869,00	(3.033.894.711,00)	-

2



2) Sekolah Menengah Kejuruan (Negeri)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					Selisih Anggaran dan SP2T	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Anggaran	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = (4-9)	11	12 = (4-11)	13
II.	02.1.02.46.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan										
1	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	20.887.878.052,00	-	-	-	-	-	20.887.878.052,00	20.770.768.255,00	117.109.797,00	-
		- SILPA '20	-					-	-	206.001.400,00	(206.001.400,00)	
		- BOS '21	20.887.878.052,00					-	20.887.878.052,00	20.564.768.855,00	323.111.197,00	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.228.818.181,00	-	82.552.338.000,00	250.000.000,00	-	82.802.338.000,00	(38.575.520.819,00)	58.503.443.673,00	(4.278.624.892,00)	-
		- SILPA '20						-	-	1.118.088.773,00	(1.118.088.773,00)	
		- BOS '21	84.228.818.181,00		82.552.338.000,00	250.000.000,00	-	82.802.338.000,00	(38.575.520.819,00)	57.385.374.300,00	(3.158.596.119,00)	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	16.452.327.045,00	-	-	-	-	-	16.452.327.045,00	15.767.854.382,00	744.472.663,00	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.452.327.045,00	-	-	-	-	-	16.452.327.045,00	11.386.983.147,00	5.065.343.898,00	-
		- SILPA '20						-	-	840.773.017,00	(840.773.017,00)	
		- BOS '21	16.452.327.045,00					-	16.452.327.045,00	10.546.210.130,00	5.906.116.915,00	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-	-	4.320.871.215,00	(4.320.871.215,00)	-
		- SILPA '20						-	-	138.187.500,00	(138.187.500,00)	
		- BOS '21	-					-	-	4.182.683.715,00	(4.182.683.715,00)	
			91.587.023.278,00	-	82.552.338.000,00	250.000.000,00	-	82.802.338.000,00	(1.235.315.722,00)	94.982.065.000,00	(3.415.042.412,00)	-



3) Sekolah Pendidikan Khusus (Negeri)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					Selisih Anggaran dan SP2T	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Anggaran	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = (4-9)	11	12 = (4-11)	13
		Pembinaan Pendidikan khusus dan layanan khusus	8.044.760.000,00	-	8.027.818.000,00	-	240.000.000,00	8.267.818.000,00	(223.058.000,00)	8.267.818.000,00	(223.058.000,00)	-
III.	02.1.03.52.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus										
1	5.1.01.55.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	2.125.323.200,00	-	-	-	-	-	2.125.323.200,00	2.000.730.200,00	124.593.000,00	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	2.125.323.200,00					-	2.125.323.200,00	2.000.730.200,00	124.593.000,00	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.381.708.400,00	-	8.027.818.000,00	-	240.000.000,00	8.267.818.000,00	(3.886.109.600,00)	4.871.576.550,00	(489.868.150,00)	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	4.381.708.400,00		8.027.818.000,00		240.000.000,00	8.267.818.000,00	(3.886.109.600,00)	4.871.576.550,00	(489.868.150,00)	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	1.537.728.400,00	-	-	-	-	-	1.537.728.400,00	1.395.511.250,00	142.217.150,00	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.053.391.600,00	-	-	-	-	-	1.053.391.600,00	1.244.170.050,00	(190.778.450,00)	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	1.053.391.600,00					-	1.053.391.600,00	1.244.170.050,00	(190.778.450,00)	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	484.336.800,00	-	-	-	-	-	484.336.800,00	151.341.200,00	332.995.600,00	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	484.336.800,00					-	484.336.800,00	151.341.200,00	332.995.600,00	
			8.044.760.000,00	-	8.027.818.000,00	-	240.000.000,00	8.267.818.000,00	(223.058.000,00)	8.267.818.000,00	(223.058.000,00)	-
JUMLAH			329.464.004.235,00	8.262.919.415,00	317.381.701.305,00	1.150.000.000,00	1.390.000.000,00	328.794.620.415,00	(8.299.616.179,00)	327.135.998.259,00	(8.671.995.123,00)	-



1) Sekolah Menengah Atas (Swasta)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					SISA ANGGARAN	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Kas BOS	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = (4-9)	11	12 = (9-11)	13
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	312.419.244.236,00	8.252.919.415,00	309.333.883.000,00	1.150.000.000,00	1.750.000.000,00	320.486.802.415,00	(8.067.568.179,00)	-	320.486.802.415,00	
L	02.1.01.53.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas										
1	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	54.812.025.035,00	-	-	-	-	-	54.812.025.035,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	54.812.025.035,00					-	54.812.025.035,00	-	-	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.195.166.651,00	8.252.919.415,00	216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	227.684.463.415,00	(103.486.266.764,00)	-	227.684.463.415,00	-
		- SILPA '20	8.252.919.415,00	8.252.919.415,00				8.252.919.415,00	-	-	8.252.919.415,00	
		- BOS '21	115.942.247.236,00		216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	219.431.544.000,00	(103.486.266.764,00)	-	219.431.544.000,00	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	41.845.029.272,00	-	-	-	-	-	41.845.029.272,00	-	-	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.845.029.272,00	-	-	-	-	-	41.845.029.272,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	41.845.029.272,00					-	41.845.029.272,00	-	-	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	-					-	-	-	-	
			220.652.220.958,00	8.252.919.415,00	216.781.544.000,00	900.000.000,00	1.750.000.000,00	227.684.463.415,00	(6.832.242.457,00)	-	227.684.463.415,00	-



2) Sekolah Menengah Kejuruan (Swasta)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					SISA ANGGARAN	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Kas BOS	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10=(4-9)	11	12=(9-11)	13
E.	02.1.02.46.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan										
1	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	20.887.878.052,00	-	-	-	-	-	20.887.878.052,00	-	-	-
		- SILPA '20	-					-	-	-	-	
		- BOS '21	20.887.878.052,00					-	20.887.878.052,00	-	-	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.226.818.181,00	-	92.552.339.000,00	250.000.000,00	-	92.802.339.000,00	(38.575.520.819,00)	-	92.802.339.000,00	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	84.226.818.181,00		92.552.339.000,00	250.000.000,00	-	92.802.339.000,00	(38.575.520.819,00)	-	92.802.339.000,00	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	16.452.327.045,00	-	-	-	-	-	16.452.327.045,00	-	-	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.452.327.045,00	-	-	-	-	-	16.452.327.045,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	16.452.327.045,00					-	16.452.327.045,00	-	-	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	-					-	-	-	-	
			91.567.023.279,00	-	92.552.339.000,00	250.000.000,00	-	92.802.339.000,00	(1.235.315.722,00)	-	92.802.339.000,00	-

1958



3) Sekolah Pendidikan Khusus (Swasta)

No	Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	REALISASI SP2B					SISA ANGGARAN	REALISASI SPJ (Rp)	Sisa Kas BOS	Ket
				SILPA	Reguler	Afirmasi	Kinerja	TOTAL TRANSFER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = (4-9)	11	12 = (9-11)	13
		Pembinaan Pendidikan khusus dan layanan khusus	8.044.760.000,00	-	7.928.068.000,00	-	240.000.000,00	8.168.068.000,00	(123.308.000,00)	-	8.168.068.000,00	-
8L	02.1.03.02.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus										
1	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	2.125.323.200,00	-	-	-	-	-	2.125.323.200,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	2.125.323.200,00					-	2.125.323.200,00	-	-	
2	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.381.708.400,00	-	7.928.068.000,00	-	240.000.000,00	8.168.068.000,00	(3.786.359.600,00)	-	8.168.068.000,00	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	4.381.708.400,00		7.928.068.000,00	-	240.000.000,00	8.168.068.000,00	(3.786.359.600,00)	-	8.168.068.000,00	
3	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal BOS	1.537.728.400,00	-	-	-	-	-	1.537.728.400,00	-	-	-
	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.053.391.600,00	-	-	-	-	-	1.053.391.600,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	1.053.391.600,00					-	1.053.391.600,00	-	-	
	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	484.336.800,00	-	-	-	-	-	484.336.800,00	-	-	-
		- SILPA '20						-	-	-	-	
		- BOS '21	484.336.800,00					-	484.336.800,00	-	-	
			8.044.760.000,00	-	7.928.068.000,00	-	240.000.000,00	8.168.068.000,00	(123.308.000,00)	-	8.168.068.000,00	-
JUMLAH			320.464.904.236,00	8.262.919.415,00	317.261.951.000,00	1.150.000.000,00	1.990.000.000,00	328.604.870.415,00	(8.190.866.179,00)	-	328.654.870.415,00	-



BAB VI PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua. Upaya-upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, serta penyusunan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa masih mengalami keterbatasan sumber daya aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan khususnya sumber daya yang berlatar belakang Akuntansi dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memberikan gambaran tentang Kondisi Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta perubahan posisi Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk koreksi silang serta penjelasan lebih lanjut antara lembaran muka (*on the face*) dari keenam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sehingga diharapkan pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa walaupun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan Akuntansi berbasis akrua, masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran bersifat konstruktif serta melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan dapat menjadi bahan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.





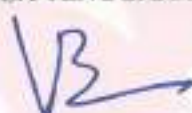
Melalui kesempatan ini, sepatutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, kiranya kerjasama yang telah terjalin tetap terpelihara dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, Pemerintah menyampaikan terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT